

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI PEMERINTAH KOTA TIDORE**

THESIS S-2



Disetujui Revisi Seminar Hasil, 7 November 2025



Dekar Urumsah

Diajukan Oleh: ERLLEN YUHARNIS 21919036

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

Pernyataan bebas plagiarisme

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta , 8 Agustus 2025



Erlen Yuharnis

Tesis

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
PEMERINTAH KOTA TIDORE**

Diajukan oleh:

Erlen Yuharnis

123456789

Disetujui oleh:

Yogyakarta, 8 Agustus 2025

Dosen Pembimbing



Drs. Dekar Urumsah, S.Si.,M.Com ., Ph.D.,Cfr

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

ERLEN YUHARNIS

No. Mhs. : 21919036

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
PEMERINTAH KOTA TIDORE**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim
Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 7 November 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh : Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Dekar Urumsah', is written over a horizontal line.

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat anugerah, ridho, dan karunia- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Saya juga menyampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah SWT.

Penyusunan tesis yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Tidore”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Pendidikan Program Master (S2) pada program studi Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai urusan dan kegiatan penulis. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. terima kasih atas segala berkah dan rahmat yang dilimpahkan kepada penulis dan keluarganya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ajaran dalam memahami kehidupan, yang menjadikan peneliti beruntung sebagai keturunan beliau.
3. Bapak dan Ibu tercinta. Terimakasih atas doa restunya, terimakasih atas semua dukungan (baik secara materi maupun non materi) dan nasehat serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama ini. Semoga ilmu yang didapatkan penulis dapat bermanfaat. Doa penulis bapak dan Ibu sehat selalu, panjang umur senantiasa dalam keberkahan dan berada dalam lindungan Allah SWT.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D. dan Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M. Res., Ph.D., CA sebagai dosen yang membimbing tesis penulis. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekar dan Ibu Ayu atas semua petunjuk, bantuan, motivasi dan saran yang telah bapak dan Ibu berikan kepada saya. Saya selalu bersyukur atas semua kebaikan, kesabaran, kesempatan, dan arahan yang bapak berikan selama ini. Saya merasa sangat beruntung dan bangga karena bisa bertemu dan mendapatkan bimbingan dari bapak.
5. Suami tercinta Papa Edy Sugiharto dan ananda Almeera Madina Tunggadewi, Napoleon Arsakha Wirabrata. Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk suami tercinta, yang

telah mendoakan, memberikan izin, mendukung untuk melanjutkan belajar di pasca sarjana ini. Dan terima kasih untuk ananda tersayang yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan tesis ini, semoga ananda tumbuh menjadi anak yang sholeh sholehah qurrota a'yun sehat, iman yang kuat, berakhlak baik dan mulia, cerdas, dan tercapai cita-citanya setinggi langit dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

6. Tantri Alfian dan Najla Athifah, Nurul A'idah ananda dan adek terbaik yang tak henti-hentinya selalu mendukung setiap saat setiap waktu sukses dan berkah selalu dalam mencapai cita – citanya.
7. Para responden yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi bapak, ibu dan saudara yang telah membantu peneliti dalam segala hal. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum Wr Wb.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
BERITA ACARA	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Fraud Hexagon Theory</i>	10
2.2 Pengertian Fraud	13
2.3 Pengadaan Barang dan Jasa	15
2.4 Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	16
2.4.1 Penipuan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	16
2.4.2 Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	17
2.5. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang atau Jasa	18
2.5.1 Sistem Pengendalian Internal	18
2.5.2 Kualitas SDM.....	19

2.5.3 Etika	20
2.5.4 Budaya Organisasi	21
2.5.5 Implementasi E- Procurement	22
2.6 Penelitian Terdahulu	23
2.7 Pengembangan Hipotesis	28
2.7.1 Pengaruh SPI Terhadap Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	28
2.7.2 Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Fraud Pengadaan Barang atau Jasa	29
2.7.3 Pengaruh Etika Terhadap Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	30
2.7.4 Pengaruh Budaya Organisasi pada Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	31
2.7.5 Pengaruh E-Procurement pada Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	31
2.8 Kerangka Model Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Metodologi Penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.3 Metode Pengumpulan Data	35
3.3.1 Sumber Data	35
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	35
3.4.1 Variabel Independen	36
3.4.1.1 Sistem Pengendalian Intern	36
3.4.1.2 Kualitas SDM	37
3.4.1.3 Etika	37
3.4.1.4 Budaya Organisasi	38
3.4.1.5 <i>E-Procurement</i>	38
3.4.2 Variabel Dependen	38
3.5 Teknik Pengujian Hipotesis	39
3.5.1 Teknik Analisa Data	39
3.5.1.1 Teknik Analisa Deskriptif	39
3.5.1.2 Teknik Analisa Kuantitatif	39
3.5.2 Pengujian Kualitas Data	40

3.5.2.1 Uji Validitas	40
3.5.2.2 Uji Reliabilitas	40
3.5.2.3 Uji t.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Deskripsi Data.....	42
4.1.2 Deskripsi Responden	44
4.2 Deskripsi Responden	
4.2.1 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.2.2 9Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia.....	45
4.2.3 Deskripsi Data Responden Menurut Pendidikan	45
4.2.4 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Masa Kerja	46
4.3 Uji Kualitas Data	
4.3.1 Uji Validitas	46
4.3.2 Uji Reliabilitas	49
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.4.1 Uji Multikolinearitas	50
4.4.2 Uji Normalitas.....	51
4.5 Uji Koefisien Determinasi	52
4.6 Uji Hipotesis	52
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
4.6.2 Uji f.....	54
4.6.3 Uji t.....	54
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.7.1 Sistem Pengendalian Internal (SPI) Berpengaruh Positif Terhadap pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa	55
4.7.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	57
4.7.3 Etika Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	58
4.7.4 Budaya Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud	

Pengadaan Barang dan Jasa.....	59
4.7.5 E-Procurement Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	60
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Implikasi	63
5.3 Keterlibatan Penelitian.....	63
5.4 Saran.....	64
 Daftar Pustaka	 65
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	70
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	75
Lampiran 3 Hasil Olah Data	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan <i>Fraud</i>	23
Tabel 3.1 Skala <i>Likert</i>	36
Tabel 3.2 Indikator Variabel SPI	37
Tabel 3.3 Indikator Variabel Kualitas SDM	37
Tabel 3.4 Indikator Variabel Etika	37
Tabel 3.5 Indikator Variabel Budaya Organisasi	38
Tabel 3.6 Indikator Variabel <i>E-Procurement</i>	38
Tabel 3.7 Indikator Variabel <i>Fraud</i>	39
Tabel 4.1 Validitas Variabel SPI	47
Tabel 4.2 Validitas Variabel SDM	47
Tabel 4.3 Validitas Variabel Etika	48
Tabel 4.4 Validitas Variabel Budaya Organisasi	48
Tabel 4.5 Validitas Variabel <i>E-Procurement</i>	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	52
Tabel 4.11 Hasil Uji f	54
Tabel 4.12 Hasil Uji t	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fraud Hexagon</i>	11
Gambar 2.8 Kerangka Model Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia	45
Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan	45
Gambar 4.4 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	46

Abstrak

Fraud merupakan penyumbang terbesar dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta. Dalam pemerintahan proses pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga seringkali terjadi penyimpangan, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup sistem pengendalian internal, kualitas sumberdaya manusia, etika, budaya organisasi, serta *e-procurement*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei melalui distribusi kuesioner kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini mencapai 131 individu. Untuk analisis statistik, penelitian ini memanfaatkan metode uji statistik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kualitas sumberdaya manusia, etika dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore

Kata Kunci: *Fraud*, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tidore

Abstract

Fraud is one of the major contributors to losses within organizations, both governmental and private. In the government sector, The procurement of goods and services still has a high level of risk, resulting in frequent irregularities. Therefore, efforts are needed to prevent fraud. This study aims to investigate the factors that influence fraud prevention in the procurement of goods and services in the Tidore City Government. The factors analyzed in this study include the internal control system, human resource quality, ethics, organizational culture, and e-procurement. This research method uses a quantitative approach by conducting a survey through distributing questionnaires to all employees involved in the procurement of goods and services in the Tidore City Government. The number of respondents involved in this study reached 131 individuals. For statistical analysis, this study utilized statistical test methods using SPSS version 25 software. The findings of this study indicate that the internal control system, human resource quality, ethics, and organizational culture have a significant influence on fraud prevention efforts in the procurement of goods and services in the Tidore City Government.

Keywords: Fraud, Government Procurement, Tidore City

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dimulainya reformasi di Indonesia beberapa tahun silam, reformasi memberikan pengaruh pada berbagai aspek kehidupan antara lain yaitu dengan adanya kebijakan melaksanakan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penipuan yang signifikan di sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Sistem pengadaan barang yang diterapkan dalam instansi pemerintah dianggap sebagai akar masalah dari kebocoran anggaran. Dalam konteks ini, sistem penerapan tradisional cenderung menciptakan peluang untuk terjadinya penipuan yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan (Amelia, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Perpres ini meliputi diantara: pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan nasional guna memperbaiki layanan publik serta perkembangan ekonomi di tingkat nasional dan daerah (Lkpp.go.id). Aspirasi serta harapan bangsa Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan

yang baik (*good governance*).

Di dalam sistem pemerintahan, proses pengadaan barang dan jasa memiliki resiko yang tinggi sehingga sering terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud disini adalah kemunculan tindakan KKN, yang berkaitan dengan beberapa isu seperti *mark-up* anggaran atau peningkatan biaya, kekurangan transparansi, dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, sehingga memunculkan kerjasama yang tidak etis antara penyedia barang dan jasa dengan panitia. Penyimpangan ini mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

Aktivitas pelayanan publik serta pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi fokus utama yang sering dibahas dalam media, dan banyak pejabat menghadapi masalah hukum karena penyimpangan tersebut. Hal ini diperkuat pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi yang terjadi di daerah terkait pengadaan sebesar 90% (Media Indonesia, 2021). Menurut informasi di situs resmi KPK, masalah pengadaan barang dan jasa berada di urutan kedua dan terus meningkat setiap tahun dari 2015 hingga 2020. Jadi, upaya untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa belum berhasil dengan baik karena masih ada kasus dalam proyek pengadaan tersebut, hal ini terlihat dari temuan yang dilaporkan oleh wakil ketua KPK menyebutkan terdapat tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terkait dugaan *fraud* proyek pengadaan barang dan jasa di beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Maluku Utara (Detikcom, 2023). Kelurahan Sofifi tepatnya Kecamatan Oba Kota Tidore merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku Utara.

Penelitian terkait dengan pencegahan *fraud* barang dan jasa telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai macam teori seperti *Teori Atribusi*, *Fraud Triangle Theory*, *Stewardship Theory*, *Fraud Diamond Theory*, *Theory Institusional* dan *Fraud Hexagon Theory*. Teori Atribusi digunakan oleh Sulistyorini (2021); *Fraud Triangle Theory* digunakan

oleh Sulistyorini (2021); Rahayu *et al.*, (2023); Yusni (2023); Wardhani *et al.*, (2021) *Stewardship Theory* digunakan oleh Rahayu *et al.*, (2023); Syalwa *et al.*, (2023). Teori *Institutional* digunakan oleh Rahayu *et al.*, (2023). Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan *Fraud Hexagon Theory*, teori ini merupakan teori pengembangan yang melengkapi teori kecurangan sebelumnya, disisi lain *Fraud Hexagon Theory* dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tiap faktor untuk menyediakan tindakan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Sistem Pengendalian Internal di dalam instansi pemerintahan diperlukannya pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal sebagai salah satu langkah pertama untuk melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*). Audit internal dalam pemerintahan memiliki peranan sebagai penilaian independen suatu organisasi dimana memiliki tujuannya yaitu menguji serta mengevaluasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut, sehingga setiap dari aktivitas yang dilakukan memiliki laporan sendiri dari masing masing unitnya. Oleh karena itu, pemeriksa dari internal ataupun audit internal hendaknya melakukan analisis dan evaluasi untuk penilaian serta memberikan saran saran yang berguna untuk perbaikan kedepannya. Sistem pengendalian internal memiliki dampak yang menguntungkan dalam upaya mencegah penipuan terkait barang dan jasa di perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta, seperti yang diungkapkan oleh penelitian (Sulistyorini, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Syalwa *et al.*, (2023) turut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh signifikan pada tindak pencegahan *fraud* pengadaan di dinas PUPR Kota Palembang.

Kualitas dari sumber daya manusia sangat penting karena bisa mempengaruhi kemungkinan terjadinya tindakan curang dalam pengadaan barang. Barnes (1995) menjelaskan bahwa pelatihan bisa membantu meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan mereka. Karyawan yang memiliki keterampilan tinggi

dan banyak pengetahuan tidak selalu berarti mereka tidak berbuat curang. Maka dari itu, kemampuan yang dimiliki harus dipadukan dengan pemahaman akan aturan dan sikap yang baik terhadap aturan tersebut. Khana dan Arora (2009) mengungkapkan bahwa memiliki kesadaran yang tinggi tentang kecurangan dapat membantu karyawan untuk lebih patuh terhadap peraturan dalam mengikuti peraturan-peraturan organisasi. Pandangan positif terhadap peraturan tersebut akan mendukung sistem pengendalian intern akan lebih terjaga. Jika kualitas sumber daya manusia dari aspek keterampilan maupun kepatuhan dalam peraturan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu hal yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pengadaan barang. Kualitas sumber daya manusia yang baik tentunya akan berpengaruh baik terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang atau jasa dalam perguruan tinggi swasta di Yogyakarta (Sulistiyorini, 2021).

Etika di dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu hal yang krusial dan harus diperhatikan agar pengadaan barang dan jasa berlangsung dengan lancar. Setiap orang yang ikut serta dalam pengadaan barang atau jasa mengikuti aturan dan kerangka kerja yang berlaku, serta menjalankan tugas mereka dengan teratur, bekerja secara profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Apabila pegawai menerapkan etika pengadaan barang atau jasa tentunya akan meminimalkan kecurangan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.*, (2023) menyatakan bahwa etika pegawai memiliki dampak pada pencegahan kecurangan selama pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin baik perilaku para pegawai, semakin mudah untuk mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Budaya dan sistem organisasi tidak akan memberikan manfaat jika pegawai tidak mengikuti etika dalam pekerjaan mereka, terutama saat mengadakan barang dan jasa. Etika pegawai juga tertulis dalam undang-undang, dan jika dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, ini bisa membantu mencegah penipuan dalam pengadaan barang atau jasa.

Budaya Organisasi menunjukkan karakter sebuah organisasi dan berfungsi sebagai panduan bagi semua anggota saat mereka melakukan tugas mereka. Budaya organisasi yang baik akan menekan tindakan *fraud* karena tidak membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan tindakan *fraud*. Upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu pencegahan, deteksi dan investigasi. Pada fase pertama yaitu langkah untuk menghentikan tindakan penipuan. Cara yang paling efektif adalah dengan mengubah cara berpikir dan budaya di dalam organisasi agar lebih fokus pada pencegahan kecurangan. Usaha ini bisa dilakukan melalui cara pengelolaan perusahaan yang baik, penyampaian yang jelas, penetapan sasaran yang masuk akal, dan kebijakan serta produk yang bisa menghindari tindakan yang tidak sesuai (Singleton, 2010). Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mencegah penipuan juga bisa dilakukan dengan membangun kejujuran dan sikap positif, terbuka, serta mengurangi peluang untuk melakukan tindakan penipuan (Albrecht, 2009). Dari hasil penelitian Rahayu *et al.*, (2023) dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak terhadap pencegahan penipuan dalam organisasi pengadaan barang dan jasa, penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kebudayaan organisasi maka pencegahan *fraud* di dalam organisasi Perangkat Daerah Kota Baru Pekanbaru akan berjalan dengan sukses.

E- Procurement adalah sistem pengadaan dilakukan secara elektronik dimana menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Implementasi *E- Procurement* sangat diperlukan karena dengan *e-procurement* yang diterapkan pengadaan barang/jasa dapat meminimalisir terjadinya *fraud* karena sistem ini lebih transparan dan akuntabilitas. Penelitian Yusni (2002) menunjukkan implementasi *e-procurement* secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Hasil pengujian tersebut memberikan arti bahwa implementasi *e-procurement* dapat mendorong peningkatan pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Banggai. Wardhani *et al.*,

(2021) menyatakan bahwa *e-procurement* merupakan sistem yang memberikan efek baik dalam menghindari terjadinya penipuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini ULP dapat memanfaatkan sistem *e-procurement* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya penipuan. Implementasi *e-procurement* terbukti berpengaruh signifikan pada tindak pencegahan *fraud* pengadaan di dinas PUPR kota Palembang.

Berdasarkan data di atas penelitian yang penulis lakukan berfokus pada upaya pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore. Pengambilan kasus *fraud* pada pemerintahan karena tingkat *fraud* pada instansi pemerintah peluangnya masih besar. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti Marsita (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal serta komitmen organisasi memiliki dampak signifikan dalam mencegah penipuan dengan dasar teori keagenan dan *fraud triangle theory*. penelitian yang mendukung juga oleh sulistyorini (2021) tentang sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, etika, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dengan menggunakan *fraud triangle theory*. berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, etika, budaya organisasi dan *e-procurement* dengan mengadopsi teori *hexagon*.

Marista (2020) menggunakan variabel sistem pengendalian internal, komitmen organisasi. Sulistyorini (2021) menggunakan variabel sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, etika, budaya organisasi. penelitian ini menerapkan variabel-variabel sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, etika, budaya organisasi, dan *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab publik. Dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik, diharapkan proses lelang bisa

berlangsung dengan cara yang terbuka, jelas, adil, dapat dipercaya, efektif dan efisien. Ini akan membantu mengurangi peluang terjadinya penipuan yang bisa merugikan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi yang sudah diberikan, peneliti ini menanyakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengawasan internal berdampak pada pencegahan penipuan?
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan penipuan?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap pencegahan penipuan?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan penipuan?
5. Apakah *e-procurement* mempengaruhi terhadap pencegahan penipuan?

1.3 Batasan Masalah

Sesuai Peraturan presiden No. 16 Tahun 2018 pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, swakelola dan penyedia. Peneliti hanya membahas masalah pada aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah dan fokus pada pencegahan terjadinya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Tidore sehingga dapat menekan terjadinya *fraud*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan gejala *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa serta strategi untuk mencegahnya proses pengadaan di Pemerintahan Kota Tidore.

1. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berperan dalam menghindari penipuan pada pembelian barang dan jasa.
2. Untuk menilai apakah kualitas sumber daya manusia berkontribusi dalam mencegah penipuan dalam pembelian barang atau jasa.

3. untuk menyelidiki apakah etika berpengaruh dalam mencegah penipuan pada pengadaan barang dan jasa .
4. untuk menilai apakah budaya organisasi mempengaruhi penipuan pengadaan barang dan jasa.
5. untuk mencari tahu apakah penggunaan *e-procurement* berimpact dalam menghindari penipuan pada pembelian barang atau jasa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan baru atau tambahan bagi peneliti atau akademisi di masa depan tentang cara mencegah penipuan di Pemerintah Kota Tidore.
2. Manfaat praktis dengan hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa agar di Pemerintah Kota Tidore terhindar dari unsur penipuan dalam pengadaan barang atau jasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai penelitian yang dilaksanakan, penelitian menyusun dengan struktur sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang sejarah, pengembangan masalah, tujuan dari penelitian, keuntungan dari penelitian, dan cara penulisan tesis. Isi dari bagian pendahuluan ini menunjukkan tujuan penelitian yang akan dibahas.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka, penulisan akan menyediakan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, mengenai upaya pencegahan penipuan di unit kerja pengadaan barang dan

jasa di Pemerintah Kota Tidore terkait dengan pengadaan barang/jasa serta bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, etika, budaya organisasi, dan *e-procurement* terhadap proses pengadaan barang/jasa.

Bab III Metode Penelitian

Di bagian ini, akan dijelaskan metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dengan cara yang mudah dimengerti. Ini akan mencakup waktu dan tempat penelitian, jenis orang yang terlibat, sampel yang diambil, alat yang digunakan untuk penelitian, dan cara menganalisis data yang meliputi uji keakuratan, uji konsistensi, dan uji t secara terpisah.

Bab IV Pembahasan

Berisi penjelasan mengenai hasil studi dan penyajian informasi yang disampaikan melalui grafik dan tabel sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan riset serta hasil analisis data seperti hasil uji validitas, pengujian reliabilitas, pengujian t parsial, dan diskusi mengenai hasil tersebut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, kontribusi, implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

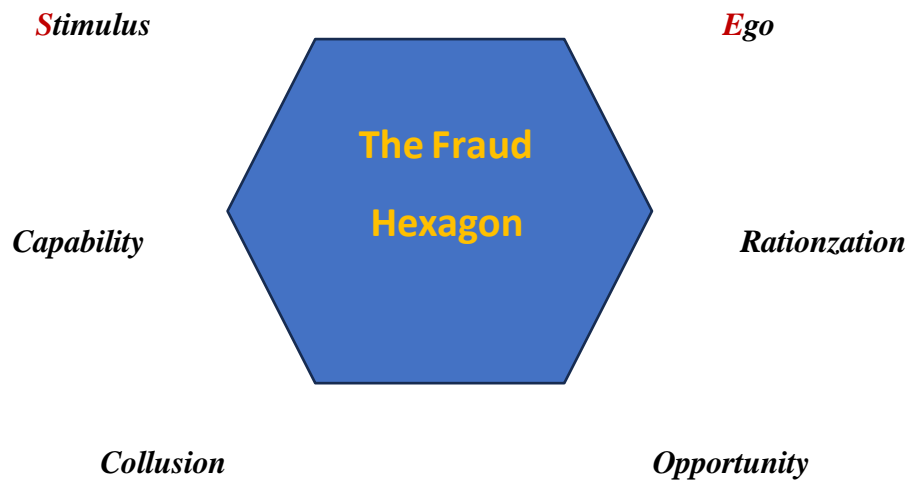
2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud Hexagon Theory*

Dengan seiringnya perkembangan zaman, teori *fraud* juga mengalami perubahan mengikuti dengan perkembangan pelaku *fraud* yang saat ini lebih pandai. Pada tahun 2019, Georgios L mencetuskan *fraud hexagon theory*, teori ini merupakan hasil pengembangan dari *fraud theory* sebelumnya yaitu *fraud pentagon theory* yang dikembangkan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011, dengan menambahkan faktor kolusi sebagai salah satu terjadinya kecurangan kolusi adalah salah satu elemen pusat dalam banyak kasus merugikan dan kompleks (Oktaviany, 2011). Kolusi merupakan sebuah perjanjian palsu antara dua orang atau lebih, teori ini disebut dengan the S.C.C.O.R.E model yang terdiri dari enam faktor kecurangan yang *stimulus, capability, competence, opportunity, rationalization* dan ego. Teori *fraud hexagon* menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan *fraud* 6 (enam) elemen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) (Vousinas, 2019).

Berikut ini *skema fraud hexagon theory* yang bentuk visualisasi dapat dilihat pada

Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Fraud Hexagon

Sumber: Vousinas (2019)

Berikut dijelaskan *fraud hexagon theory* dalam keseluruhan tahapan, yaitu:

1. *Stimulus*

Preasure adalah sebuah tindakan yang timbul ketika individu melakukan tindakan penipuan. *Stimulus* adalah elemen dalam reaksi terhadap rangsangan yang terkait dengan perilaku (Hartono, 2016). Menurut Vousinas (2019) menjelaskan bahwa dorongan muncul ketika perusahaan menghadapi tekanan yang berkaitan dengan uang dan hal lain. Tekanan ini meliputi kebutuhan untuk memiliki banyak uang, serta kebutuhan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik agar dapat mencapai target, terutama di waktu-waktu krisis, frustasi terkait lingkungan kerja, aspirasi profesional dan keinginan untuk mencapai sesuatu sesegera mungkin. Tekanan tersebut didorong oleh faktor kebutuhan yang tidak terpenuhi. Skousen *et al.*, (2009), menyebutkan bahwa tekanan terstimulasi ketika perusahaan mengalami kinerja di bawah target industri.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Opportunity atau kesempatan adalah situasi yang membuat manajemen bisa melakukan penipuan untuk keuntungan mereka (Sari dan Safitri, 2019). Salah satu cara untuk mengurangi penipuan adalah dengan memiliki mekanisme pengawasan yang baik di dalam perusahaan. Fuad et al., (2020) mengatakan bahwa tindakan penipuan terjadi karena sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah, sehingga peluang penipuan meningkat. Ini berarti bahwa jika pengawasan tidak efektif, maka akan ada lebih sedikit kesempatan untuk melakukan penipuan

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah cara seseorang memberi alasan untuk tindakannya yang tidak jujur. *Rasionalisasi* adalah faktor yang membuat kecurangan terjadi, dimana orang yang melakukan penipuan mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, seperti orang-orang yang mereka sayangi atau untuk kebahagiaan keluarga mereka (Desviana et al., 2020). Ketika seseorang memiliki integritas yang rendah, cara berpikirnya bisa membuatnya merasa benar saat melakukan kecurangan. Loebbecke et al., (1989) dalam penelitian Skousen et al., (2009) menemukan bahwa sebagian besar tindakan penipuan dalam sampel mereka terjadi dalam dua tahun pertama masa kerja auditor. Perubahan dalam kantor akuntan publik bisa menjadi salah satu tanda dari rasionalisasi.

4. Kemampuan (*capability*)

Kemampuan dipahami sebagai potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Keahlian ini penting bagi karyawan untuk membantu pertumbuhan usaha dan juga bisa mengatur sosial yang bisa memberi keuntungan bagi mereka. Kemampuan ini menunjukkan seberapa baik seorang karyawan dapat mengenali dan mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan curang.

5. Ego

Ego adalah bagian dari pikiran yang terbentuk karena kebutuhan makhluk hidup yang berkaitan dengan kenyataan (Hartono, 2016). Vousinas (2019) menyatakan bahwa salah satu jenis kepribadian dalam hal penipuan adalah sifat “egois”, dimana seseorang berusaha untuk sukses dengan cara apapun, sangat fokus pada diri sendiri, percaya diri, dan terkadang bersikap narsis. Vousinas (2019) juga mengatakan bahwa ego bisa dipengaruhi oleh moral yang membuat orang tidak dapat berfungsi dengan baik. Menurut Aprilia (2017), sifat ini muncul akibat kepentingan diri sendiri yang besar dalam diri seseorang, sehingga membuat egonya semakin besar. Sifat ini dapat memunculkan keyakinan bahwa tindakan penipuan yang dilakukannya tidak akan terdeteksi dan ia tidak akan mendapatkan hukuman apapun.

6. *Collusion*

Collusion adalah suatu kesepakatan yang melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menipu pihak lain dari hak yang mereka miliki. Kolusi membuat kerja sama antara para pelaku penipuan sehingga tercipta rencana penipuan yang besar dan membuat korban mengalami kerugian yang sangat tinggi. Kolusi menjadi tambahan faktor yang memicu terjadinya penipuan (Vousinas, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa kolusi bisa terwujud melalui kerjasama dalam proyek yang dikelola pemerintah. Kerjasama antara perusahaan dan proyek pemerintah dapat membuka peluang untuk tindakan penipuan. Hal ini terjadi karena banyak proyek pemerintah yang terlibat dalam skandal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melibatkan banyak orang. Hasil dari penelitian Sari dan Nugroho (2020) dan Wijyantika (2019) memperlihatkan ada pengaruh kolusi dalam menemukan kecurangan pada laporan keuangan.

2.2 Pengertian Fraud

Menurut kamus hukum black (ACFE 2011) pernyataan tentang standar unit no.99 menjelaskan bahwa penipuan adalah suatu tindakan nasional yang menyatakan tindakan yang keliru yang materiil dalam laporan keuangan yang menjadi objek audit. Penipuan mencakup segala hal yang dilakukan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil atau curang yang bisa membuat orang lain terjebak. Menurut Hall (2017), penipuan adalah sebuah kebohongan yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan dalam menyampikan laporan aset perusahaan, dan mengubah data keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.

Melakukan kecurangan ini. Sedangkan penipuan menurut Institut Auditor Internal (IIA) adalah suatu kegiatan menipu yang mencakup tindakan-tindakan yang menyimpang dan ilegal, yang dengan jelas dilakukan untuk menipu. Berdasarkan sistem klasifikasi kecurangan pekerjaan yang seragam, ACFE (2000) membagi penipuan (*fraud*) menjadi tiga tipe atau jenis berdasarkan tindakan, yaitu:

1. Penyalahgunaan aset (penyimpangan atas aset)

Penyalahgunaan aset adalah mencuri atau menyalahgunakan barang milik perusahaan atau orang lain. Jenis penipuan ini gampang dikenali karena biasanya langsung terlihat atau bisa diukur.

2. Pernyataan yang tidak benar atau salah (pernyataan palsu)

Pernyataan palsu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemimpin atau pegawai suatu perusahaan lembaga pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan membuat laporan keuangan yang menipu. Ini mereka lakukan supaya bisa mendapatkan keuntungan.

3. Korupsi

Korupsi adalah jenis penipuan yang sukar untuk ditangkap, karena sering melibatkan

kerjasama dengan orang lain, misalnya suap, hadiah tidak wajar, dan korupsi. Jenis penipuan ini sering terjadi di negara yang sedang berkembang karena hukum yang tidak tegas dan kurangnya integritas. Tindakan penipuan jenis ini kadang sulit untuk dikenali. Deteksi terjadi karena banyak pihak saling membantu untuk mendapatkan keuntungan dengan kelompok mereka. Contoh lain dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau adanya konflik kepentingan, penerima uang secara ilegal, pemerasan ekonomi, dan suap. Kasus penipuan di Pemerintahan Kota Tidore muncul karena ada kepentingan pribadi atau sekelompok orang dalam organisasi tersebut yang dapat merugikan orang lain. Pemerintahan Kota Tidore membutuhkan sarana dan prasarana untuk pengadaan barang dan jasa yang harganya cukup tinggi dan melakukan pemesanan melalui berbagai pemasok. Oleh karena itu perlu ada sistem untuk mengontrol pengadaan barang agar tidak terjadi penipuan.

2.3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengertian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Bab I Ketentuan pasal I Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) / Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (*Setkab.go.id*).

2.4 Pencegahan (*fraud*) Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Purba (2015) pencegahan tindakan kecurangan mempunyai fungsi sebagai penghambat untuk mengatasi orang – orang yang berpihak pada tindakan *fraud*. Langkah ini dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi pelaku *fraud* yang berpotensi, sehingga dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut. Tuanakota (2007) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat diminimalkan melalui penerapan pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Konsep *fraud by need*, *by greed*, dan *by opportunity* merupakan cara sederhana untuk menggambarkan penyebab atau akar dari masalah *fraud*. Tuanakota (2007) menjelaskan bahwa untuk mencegah *fraud*, penting untuk menghapus atau meminimalisir penyebabnya. Seringkali, banyak organisasi menghapus tidak melakukan upaya yang memadai dalam menangani penipuan dengan cara lebih cepat dan maju. Saat penipuan terjadi, banyak organisasi cenderung bergerak dengan lambat. Organisasi yang sudah mengalami kasus penipuan biasanya memilih untuk menyelesaikan masalah itu di dalam tubuh mereka sendiri dan tidak ingin mengungkapkannya. Selanjutnya, kasus tersebut ditutup dan dianggap telah selesai.

2.4.1 Penipuan Pengadaan Barang/Jasa.

Penipuan bertujuan untuk menipu dan mempengaruhi orang lain, yang bisa merugikan mereka, dan menurut hukum, tindakan ini adalah perbuatan curang. Hall (2017) menjelaskan bahwa penipuan harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Penyampaian yang kurang benar. Biasanya ada laporan yang sah.
2. Fakta yang penting. Fakta ini adalah hal yang mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Niat, ada tujuan untuk menipu.
4. Keterikatan yang bisa dibenarkan. Penyampaian yang tidak benar harus menjadi faktor besar yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

5. Perilaku tidak adil atau kerugian. Kebohongan tersebut menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban penipuan.

Penipuan bisa terjadi dalam dua tingkatan, yaitu penipuan manajemen dan penipuan karyawan. Penting untuk membedakan kedua jenis penipuan ini karena masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda.

- a. Penipuan karyawan bertujuan untuk langsung mengambil uang atau aset lain untuk keuntungan pribadi. Ini terjadi ketika karyawan memanipulasi organisasi. Jika organisasi memiliki sistem kontrol internal yang baik, maka kebangkrutan atau penggelapan uang bisa dihindari.
- b. Penipuan manajemen lebih tersembunyi dan lebih berbahaya daripada penipuan karyawan, dan sering tidak terdeteksi, menyebabkan kerugian bagi organisasi. Penipuan ini kadang menunjukkan bahwa pihak manajemen sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan mengabaikan sistem kontrol internal.

2.4.2. Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Pope (2007), pencegahan *fraud* barang/jasa di antaranya dengan cara:

1. Memperkuat kerangka hukum

Dengan adanya ketegasan aturan di instansi maka akan menjadi kendali pelaku tindak kecurangan. Peraturan yang menjadi ketentuan pengadaan barang dan jasa Kepres No 80 Tahun 2003 yang perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 yang dapat menghalangi tindak pidana korupsi.

2. Proses yang Jelas

Untuk melawan kecurangan, kita perlu menerapkan cara yang terbuka dan jelas dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa hal yang menunjukkan proses yang jelas adalah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar yang jelas tentang barang apa saja yang ingin dibeli.

- b. Menjelaskan dengan gamblang tentang kriteria yang digunakan saat memilih barang yang akan dibeli.
 - c. Menerima tawaran dari mitra yang dapat dipercaya.
 - d. Membandingkan berbagai tawaran untuk memilih yang terbaik, dengan memperhatikan anggaran yang ada, memilih harga yang lebih murah namun kualitas yang lebih baik.
 - e. Memberikan kontrak kepada penawar yang terpilih tanpa harus mengubah harga yang sudah ditetapkan.
3. Membuka Dokumen Tender
- Transparansi berarti tidak memihak, seperti membuka tender di waktu dan tempat yang sudah ditentukan agar semua tawaran dan harganya terlihat jelas, sehingga bisa mengurangi risiko tawaran yang dijadikan rahasia.
4. Menilai Tawaran
- Langkah ini adalah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan harus dilakukan dengan benar dan adil.
5. Menyerahkan Wewenang
- Tindakan meninjau kembali sebagai cara untuk mengatasi kesalahan atau penipuan agar bisa diperbaiki, serta penyerahan wewenang untuk menyetujui kontrak.
6. Pemeriksaan
- Tahap ini sangat penting agar pengadaan barang dan jasa sesuai dengan harapan.

2.5 FaktorFaktor yang Berpengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut penelitian yang ada, ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2.5.1 Sistem Pengendalian Internal

Dalam mengelola sebuah organisasi, termasuk perusahaan dan lembaga pemerintah, baik yang dari pusat maupun daerah, penting untuk memiliki sistem pengendalian yang baik. Tujuan dari pengendalian ini adalah agar semua aktivitas dapat berlangsung dengan lancar dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati *et al.*, (2017) menemukan bahwa Peran pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, hal ini terbukti bahwa hasil penelitian mendukung teori dan hasil penelitian juga membuktikan fenomena yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian internal maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian internal, menurut IAPI (2011:319.2), adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan pihak lainnya. Proses ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup mengenai keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut kebijakan PP 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal terdiri dari aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh manajemen dan semua karyawan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang layak dalam mencapai sasaran perusahaan. Unsur-unsur dari sistem ini meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian.

2.5.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya untuk menghentikan penipuan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pencegahan, menemukan, dan menyelidiki. Dibagian pertama, yang dikenal sebagai pencegahan penipuan, cara yang paling efektif adalah mengubah cara berpikir dan budaya di dalam organisasi agar lebih peduli terhadap tindakan curang. Kualitas orang-orang yang bekerja di organisasi itu berhubungan dengan cara mereka bertindak. Jika kita memiliki tenaga kerja yang terampil dan

beretika, maka kita bisa mencegah penipuan.

Kualitas orang-orang yang bekerja di organisasi itu berhubungan dengan cara mereka bertindak. Jika kita memiliki tenaga kerja yang terampil dan beretika, maka kita bisa mencegah penipuan. Penelitian oleh Sulistyorini pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja memiliki dampak positif dalam mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Tenaga kerja berperan penting dalam mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta artinya semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan mampu mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian dari Gita *et al.*, (2024) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kasus *fraud* atau kecurangan akuntansi. Hal ini dibuktikan karena kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan memungkinkan mereka untuk memahami dengan prinsip-prinsip akuntansi dan standar yang berlaku, serta menguasai teknik dan metode yang diperlukan dalam pengendalian internal.

2.5.3 Etika

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan agar proses pengadaan berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 7, mengenai etika pengadaan barang dan jasa, disebutkan bahwa semua orang yang terlibat harus mengikuti aturan etika berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan teratur dan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan serta memastikan kelancaran dan ketepatan proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang harus dirahasiakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Para pihak tidak boleh saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya kompetisi bisnis yang tidak sehat.
- d. Pihak-pihak yang terlibat harus menerima dan bertanggung jawab atas semua keputusan

- yang diambil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditulis diantara mereka.
- e. Pihak-pihak terkait harus menghindari dan mencegah terjadinya konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - f. Pihak-pihak yang terikat harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan serta kebocoran anggaran negara.
 - g. Pihak-pihak yang terlibat harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi.
 - h. Pihak-pihak dilarang untuk menerima, menawarkan, atau berjanji untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, potongan harga, atau apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga terhubung dengan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian Rahayu *et al.* (2023) etika pegawai berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di dalam proses pengadaan barang dan jasa di organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Semakin baik implementasi etika pegawai maka pencegahan *fraud* di dalam proses pengadaan barang dan jasa akan semakin baik.

2.5.4 Budaya Organisasi

Budaya Organisasi dapat dijelaskan sebagai kumpulan nilai-nilai, aturan perilaku, norma, dan harapan yang membuat orang dalam kelompok atau organisasi berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan mereka (Jones dan George, 2003). Jadi, kita bisa katakan bahwa budaya organisasi adalah cara berpikir dan nilai-nilai, aturan-aturan, serta harapan yang dibangun oleh sekumpulan orang dalam suatu lembaga. Penting bagi semua anggota untuk percaya pada budaya ini agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerjasama internal dan penyesuaian didalam organisasi. Oleh karena itu, hal ini harus disampaikan kepada anggota baru supaya mereka bisa memahami cara berpikir dan pandangan tanpa menciptakan masalah. Pemerintahan Kota Tidore. Hasil penelitian dari Rahayu *et al.*,

(2023) menyatakan bahwa Organisasi memiliki peran penting dalam mencegah penipuan selama proses pembelian barang dan jasa. Dari penelitian itu, ditemukan bahwa semakin kuat budaya organisasi, semakin efektif pencegahan penipuan dalam proses pembelian barang dan jasa di organisasi Pemerintah Daerah kota Pekanbaru.

2.5.5 E-Procurement

Sistem *e-procurement* adalah cara membeli barang dan jasa yang dilakukan secara online. Sistem ini merupakan langkah baru yang dibuat oleh LKPP untuk meningkatkan tanggung jawab dalam proses membeli barang dan jasa, sehingga proses tersebut menjadi lebih cepat, lebih efisien dan menunjukkan keterbukaan serta transparansi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan adanya sistem *e-procurement* ini, diharapkan bisa membantu mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, karena sistem elektronik yang digunakan dapat diandalkan dan tersusun dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dalam proses tersebut. Hasil penelitian dari Cahyani (2019) implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa artinya dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin baiknya penggunaan *e-procurement*, hal itu dapat membantu mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan *Fraud*

No.	Penelitian	Variabel	Teori, Sampel, Metode, Alat Analisis	Hasil
1.	Setyorini (2021)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sistem Pengendalian Internal ● Kualitas SDM ● Etika ● Budaya Organisasi <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Theory Atribus</i> ● <i>Fraud Triangle Theory</i> ● <i>Fraud Diamond Theory</i> ● <i>Fraud Crowe Pentagon</i> ● 100 Responden Perguruan Tinggi Swasta ● Metode Kuantitatif ● SPSS versi 20 	Variabel dari Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Etika, Budaya Organisasi berpengaruh positif pada pencegahan <i>Fraud</i> pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi swasta .
2.	Ningrum <i>et al.</i> (2022)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengendalian Internal ● Penegakan Peraturan ● Kesesuaian Kompensasi ● Komitmen Organisasi Budaya Etis Organisasi <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Fraud Triangle Theory</i> ● 161 responden ● Metode Kuantitatif ● SPSS versi 2.3 	Variabel penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi. Dan budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap fraud, sedangkan variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap fraud

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Penelitian	Variabel	Teori, Sampel, Metode, Alat Analisis	Hasil
3.	Gita <i>et al.</i> (2024)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● Pengendalian Internal ● Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan Fraud Akuntansi ● <i>Fraud Hexagon</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuantitatif ● 50 responden pegawai pemerintah ● Statistik SPSS 	Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan pencegahan kasus <i>Fraud</i> Akuntansi
4.	Cahyani (2019)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● E-Procurement ● Pengendalian Internal ● Kualitas Sumber Daya Manusia Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> pengadaan Barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Fraud Triangle Theory</i> ● Metode Deskriptif Kuantitatif ● 44 pegawai Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Kidul ● <i>Cronbach Alpha</i> 	Implementasi <i>e-procurement</i> dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa sedangkan pengendalian internl tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Penelitian	Variabel	Teori, Sampel, Metode, Alat Analisis	Hasil
5.	Yusni (2022)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● <i>E-Procurement</i> ● Komitmen Organisasi ● Pengendalian Internal Pemerintah Variabel dependen <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Triangle Fraud Theory</i> ● Metode Kuantitatif ● 132 Responden tiap OPD ● Metode analisis SEM dengan pendekatan <i>Partial Least Squares</i> (PLS) 	Implementasi e-procurement, komitmen organisasi, sistem internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah
6.	Syalwa <i>et al.</i> (2023)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● Komitmen Organisasi ● Sistem Pengendalian Internal ● Implementasi <i>E-procurement</i> Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Theory stewardship</i> ● Responden 56 ASN pada PUPR ● Metode Analisis dan Uji Hipotesis ● SPSS V 26 	Komitmen organisasi, SPI, dan bukti implementasi <i>e-procurement</i> terbukti berpengaruh signifikan pada tindak pencegahan <i>fraud</i> pengadaan di dinas PUPR kota Palembang

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Penelitian	Variabel	Teori, Sampel, Metode, Alat Analisis	Hasil
7.	Irene <i>et al.</i> (2021)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● <i>E- procurement</i> ● Religiusitas Variabel Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Fraud Triangle Theory</i> ● Responden 124 seluruh pegawai ULP di Provinsi Sumatera Utara ● Metode Kuantitatif SEM (Structural Equation Modelling) 	Variabel e-procurement & religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan
8.	Mu'ah <i>et al.</i> (2023)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● <i>E- Procurement</i> Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Fraud</i> pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Teori Keagenan ● 276 Koresponden ● Metode deskriptif kuantitatif ● SPSS 	E-Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Penelitian	Variabel	Teori, Sampel, Metode, Alat Analisis	Hasil
9.	Andari (2020)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● Pengendalian Internal ● Komitmen Organisasi Variabel Dependent <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) ● Teori Segitiga Kecurangan (<i>Fraud Triangle Theory</i>) ● Teori Tata Kelola Pemerintahan (<i>Public Governance Theory</i>) ● 85 orang yang menjawab ● Metode sampel yang ditujukan ● <i>Partial Least Square (PLS)</i> 	Sistem pengendalian internal dan tekad perusahaan berdampak baik yang nyata dalam menghindari penipuan.
10.	Pramesti <i>et al.</i> (2020)	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ● Pengendalian Internal ● Komitmen Organisasi ● Kompensasi Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ● Pencegahan <i>Fraud</i> pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Teori Kontijensi ● 40 responded ● Metode <i>Non Probability sampling</i> ● Statistik deskriptif 	Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kompensasi berpengaruh positif dalam pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa

2.7 Pengembangan Hipotesis

Berikut ini disajikan ide-ide tentang alasan yang mempengaruhi pembuatan hipotesis untuk mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa alasan tersebut mencakup sistem pengawasan internal, kemampuan sumber daya manusia, nilai-nilai etika, dan budaya di dalam organisasi dan *e-procurement*.

2.7.1 Pengaruh SPI terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Mulyadi (2010), sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan orang-orang lainnya, yang bertujuan memberikan jaminan yang cukup mengenai pencapaian tiga jenis tujuan, yaitu pelaporan keuangan yang benar, kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang ada, serta efisiensi dan efektivitas operasional. SPI, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), adalah proses yang terintegrasi dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Niswonger, Warren, Reeve, dan Fees (2005) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, menjamin bahwa informasi perusahaan akurat, dan memastikan bahwa hukum serta peraturan diikuti dengan benar. Dengan adanya SPI yang diterapkan di instansi, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Ini akan menjadi alat pengendali yang baik dari awal pemesanan barang hingga pembayaran yang tepat. Salah satu contoh dari tindakan menyimpang adalah kecenderungan untuk melakukan penipuan, di mana faktor penyebab terjadinya penipuan ini adalah adanya kesempatan untuk melakukan penipuan. Dengan menggunakan teori *fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019),

penipuan ini muncul karena adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian menyebabkan terjadinya penipuan. Penelitian yang dilakukan Linda (2021); Granita (2002); Gita (2024); Erika (2019); Yusni (2022); Mutiara (2023); Marsita (2020); Made (2020) menyatakan bahwa kontrol internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tindakan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam studi ini, penulis tidak melakukan pengukuran terhadap sistem pengendalian intern, melainkan berdasarkan pandangan responden mengenai sistem pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Tidore. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada persepsi pencegahan kecurangan barang/jasa

2.7.2 Pengaruh Kualitas SDM terhadap *Fraud* pengadaan Barang/Jasa

Di Pemerintahan Kota Tidore, kualitas sumberdaya manusia berperan penting dalam menentukan mitra penyedia barang dan jasa serta perjanjian yang terikat dalam kontrak. Untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, maka sumberdaya manusia dalam pengadaan harus memiliki integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas (Celentani dan Ganuza, 2001). Dengan mengadopsi *fraud hexagon theory* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), maka kualitas SDM pengadaan barang dan jasa yang kurang baik menjadi peluang (*opportunity*) yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Penelitian yang mendukung dilakukan oleh Linda (2021); Gita (2024) bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pengadaan barang /jasa. Dalam penelitian ini penulis tidak mengukur kualitas SDM pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Tidore. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Internal memberikan dampak yang baik terhadap cara pandang dalam mencegah kecurangan barang/jasa

2.7.3 Pengaruh Etika Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Etika yang baik dalam membeli barang dan jasa sangat penting untuk dibangun di Pemerintahan Kota Tidore agar bisa mencegah penipuan. Menurut Perpres No 16 tahun 2018 pasal 7, etika dalam pengadaan barang dan jasa menyatakan bahwa semua yang terlibat, seperti pengguna dan penyedia, tidak boleh menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau komisi dari siapa pun yang berkaitan dengan proses pengadaan. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus menjunjung tinggi etika ini. Hal ini penting karena jika ada calon mitra yang menawarkan hadiah, maka bisa membuat pihak pengadaan yang tidak memiliki integritas mengubah sikap mereka dan melanggar aturan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan etika yang baik dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kolusi dan korupsi.

Contoh etika yang kurang baik adalah ketika seorang supplier memberikan sesuatu kepada pihak pengadaan agar mereka mempercepat proses pembayaran dengan membuat dokumen serah terima dengan cepat untuk dikirim ke bagian keuangan. Dengan menggunakan teori *fraud hexagon* yang dibuat oleh Vousinus pada tahun 2019, bisa dilihat bahwa kurangnya etika yang baik bisa membuka peluang bagi tindakan penipuan.

Peneliti yang mendukung pendapat Linda pada tahun 2019 menyatakan bahwa etika sangat berpengaruh terhadap terjadinya penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, penulis tidak mengukur etika secara langsung, tetapi menggunakan pandangan responden mengenai etika dalam mencegah penipuan untuk pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Tidore. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Etika dalam pengadaan memiliki dampak positif pada pandangan tentang terjadinya penipuan dalam pencegahan barang dan jasa.

2.7.4 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penipuan Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Budaya Organisasi adalah salah satu elemen penting yang bisa membantu mencegah penipuan. Di Pemerintah Kota Tidore, dalam proses pengadaan barang dan jasa, sangat penting untuk membangun budaya organisasi yang baik, terutama dalam cara setiap bagian berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Jika bagian-bagian tidak saling berkomunikasi dengan baik, bisa terjadi salah paham. Misalnya, bagian pengadaan barang bisa saja menerima uang dari supplier, yang seharusnya masuk ke kas pemerintah, namun malah masuk ke kantong pribadi seseorang. Dengan menggunakan Teori *Fraud Hexagon* yang dibuat oleh Vourias (2019), bisa dilihat bahwa tanpa adanya budaya organisasi yang baik, penipuan tentu saja bisa muncul karena adanya cara berpikir yang rasionalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2021) menyatakan bahwa budaya organisasi bisa meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam penelitian ini, penulis tidak mengukur budaya organisasi secara langsung, tetapi melihat pendapat responden tentang budaya organisasi dalam mencegah penipuan di pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore. Berdasarkan teori dan pembahasan penelitian sebelumnya, hipotesis yang bisa dibuat dalam penelitian ini adalah:

H4: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pandangan tentang pencegahan penipuan.

2.7.5 Pengaruh *E-Procurement* Terhadap Penipuan Pengadaan Barang/Jasa.

E-procurement adalah cara membeli barang atau jasa menggunakan teknologi elektronik, seperti internet atau jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk membuat proses pembelian dan penjualan secara online menjadi lebih mudah dan cepat efektif dan efisien atau memanfaatkan *e-marketplace*. Sebelum menggunakan *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan masih ditemukan kelemahan dalam sistem prosedur, diantaranya adalah tidak transparannya atau terbuka, tidak dapat diketahui dengan mudah dan terus menerus, ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas serta persyaratan-persyaratan yang berlebihan,

adanya peluang yang memungkinkan *stakeholder* terkait untuk saling intervensi, tata cara dari evaluasi yang kurang jelas mengandung ketidakpastian dan menyimpan perihal yang tidak pasti serta menghasilkan penyedia jasa yang diragukan keasliannya untuk dapat menyelesaikan dari pekerjaan yang tidak berkualitas.

Hal tersebut merupakan salah satu contoh kelemahan sistem prosedur, maka dari itu dapat disimpulkan jika pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum *e-procurement* tidak efektif dan efisien. Dengan adanya *e-procurement* di Pemerintahan Kota Tidore diharapkan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, bersaing, transparansi, adil dan tanggung jawab. Dengan mengadopsi *fraud hexagon theory* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) dengan menerapkan *e-procurement*

Dengan mengadopsi *fraud hexagon theory* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), dengan adanya *e-procurement* tentunya meminimalkan adanya peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa . Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2021); Erika (2019); Yusni (2022); Mutiara *et al.*, (2023); Irene (2021); Mu'ah (2023) menyatakan bahwa *e-procurement* berpengaruh baik pada seberapa efektif sistem kontrol internal dalam pengadaan barang/jasa.

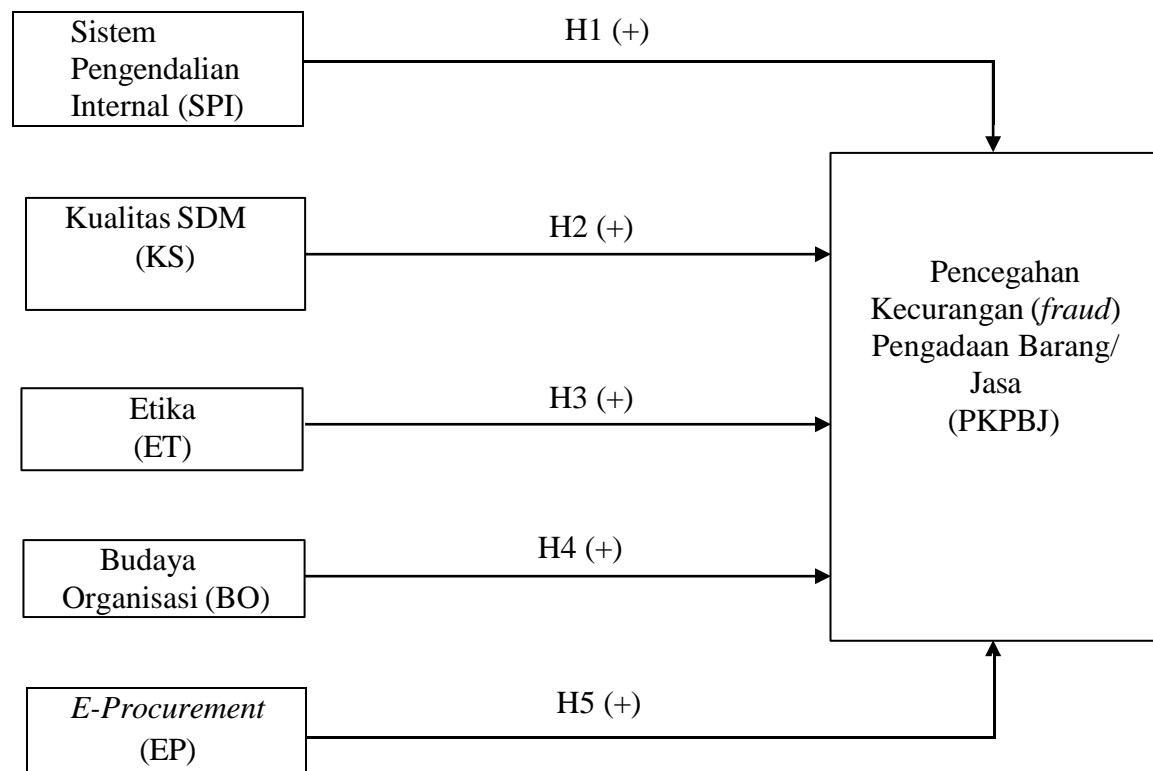
Dalam studi ini, penulis tidak mengukur *e-procurement*, tetapi melihat bagaimana responden melihat budaya organisasi yang mencegah penipuan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Tidore. Berdasarkan teori, pemikiran, dan analisis dari penelitian sebelumnya, hipotesis yang bisa dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: *e-procurement* memiliki pengaruh positif terhadap pandangan tentang pencegahan kerugian.

2.8 Model Penelitian

Tujuan dari pembuatan model penelitian ini adalah untuk membantu pembaca memahami tentang pencegahan penipuan di Pemerintah Kota Tidore.

Model penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Kerangka Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dan melakukan survei untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana beberapa faktor mempengaruhi satu hal, yaitu untuk menguji variabel yang tidak terpengaruh, seperti sistem pengendalian internal (SPI), kualitas sumberdaya manusia (KS), etika (ET), budaya organisasi (BO), dan *e-procurement* (EP). Sementara itu, yang ingin kita lihat sebagai hasil dari penelitian ini adalah pencegahan kecurangan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok dari orang-orang atau barang yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (Kuncoro, 2013). Populasi adalah area yang bisa kita umumkan di mana terdapat subjek atau objek dengan karakter serta kualitas tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan darinya bisa diambil kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari bagian pengadaan barang dan jasa di semua Organisasi Pemerintah Daerah di Kota Tidore.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber informasi untuk penelitian ini (Kuncoro, 2013). Untuk mengambil sampel, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu baik dari segi jumlah maupun aspek lainnya sesuai dengan kriteria di organisasi Pemerintah Daerah Kota Tidore.

Sampel yang diambil berasal dari semua Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Pemerintahan Kota Tidore. Peneliti menggunakan saran dari Roscoe yang ada dalam buku *Research Methods for Business*, yang dikutip oleh Sugiyono (2017), yang menunjukkan bahwa ukuran sampel yang baik untuk suatu penelitian adalah lebih dari 30 tapi kurang dari

500. Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah, dan dari setiap OPD yang terlibat ada 5 variabel dalam pengadaan barang dan jasa: sistem pengendalian internal (SPI), kualitas SDM (KS), etika (ET), budaya organisasi (BO), dan *e-procurement* (EP). Untuk memastikan jawaban kuesioner yang dikumpulkan dari responden adalah valid, peneliti mengikuti rumus dari Hair *et al.*, (2019) yang menghitung jumlah minimal responded berdasarkan indikator yaitu $26 \times (5-10) = \text{minimal } 130$ responden. Sampel tidak hanya dibuat dari bagian penyedia barang dan jasa saja, tetapi juga termasuk internal auditor dan ASN yang ikut serta sebagai panitia dalam pengadaan barang dan jasa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti data primer. Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari kontak antara peneliti dan responden tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore. Kuisisioner ini berisi pertanyaan yang disusun secara rapi oleh peneliti untuk meneliti variabel yang ada dalam penelitian ini.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner melalui *Google Form* kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pemerintah Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara. Termasuk pejabat yang mengelola anggaran di semua organisasi perangkat daerah yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner tersebut berisi daftar pernyataan yang telah disusun secara teratur oleh peneliti dan kemudian peneliti meminta responden untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Peneliti ini memakai skala *Likert* yang menggunakan cara memberi nilai. Cara memberi nilai ini dibagi menjadi 6 kelompok angka. Skala *Likert* bisa dilihat di Tabel 3.1. Peneliti ini menggunakan skala *Likert* dengan metode pemberian skor (*scoring*). Metode pemberian skor (*scoring*) dibagi menjadi 6 kategori skor. Skala *likert* dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tabel Skala *Likert*

Jawaban Angket Penelitian	Simbol
Sangat Setuju	6
Setuju	5
Agak Setuju	4
Agak Tidak Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Ciri khas skala *Likert* adalah semakin tinggi nilai yang didapat oleh seseorang itu menandakan bahwa orang tersebut memiliki sikap yang semakin positif terhadap hal yang sedang diteliti oleh peneliti (Erlina, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala *likert* 6 poin atau genap karena dapat membantu dalam menghindari "*Central Tendency Bias*" yang dapat terjadi pada skala *likert* ganjil. *Central Tendency Bias* adalah tendensi responden untuk memberikan jawaban yang cenderung pada pilihan tengah pada skala *Likert* ganjil, seperti 3 poin atau 5 poin, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat (Sugiyono, 2018).

3.4.1 Variabel Independen

3.4.1.1 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini dibuat berdasarkan COSO (2013). Sistem ini mencakup beberapa hal, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Jika lingkungan pengendalian internalnya baik, maka akan sulit bagi orang untuk melakukan tindakan curang. Harapan di pemerintah Kota Tidore, sistem pengendalian internal bisa membantu mengurangi

terjadinya kecurangan. Tabel 3.2 menunjukkan item yang digunakan untuk menilai sistem pengendalian internal (SPI).

Tabel 3.2 Indikator Variabel SPI

Variabel	Indikator	Sumber
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian Risiko c. Aktivitas Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan	COSO (2013)

3.4.1.2 Kualitas SDM

Kualitas sumberdaya manusia menurut Nurhajanti (2017) mengatakan bahwa untuk memiliki kualitas dari sumber daya manusia yang baik, perlu ada integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi di dalam suatu organisasi yang menangani pengadaan barang atau jasa. Tabel 3.3 menunjukkan item yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tabel 3.3 Indikator Variabel Kualitas SDM

Variabel	Indikator	Sumber
Kualitas SDM	a. Integritas b. Kompetensi c. Objektivitas d. Independen	Nurhanjanti (2017)

3.4.1.3 Etika

Tang *et al.*, (2012) membahas tentang perilaku yang tidak baik atau tidak etis dalam suatu organisasi. Adapun Perilaku ini meliputi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumberdaya organisasi, serta sikap tidak melakukan tindakan apapun. Tabel 3.4 menunjukkan item yang digunakan untuk mengukur etika.

Tabel 3.4 Indikator Variabel Etika

Variabel	Indikator	Sumber
Etika	a. Penerapan Kode etik b. Tanggung jawab Profesi c. Objektivitas d. Perilaku Profesional	Tang <i>et al.</i> (2012)

3.4.1.4 Budaya Organisasi

Menurut Robbins (2013), budaya organisasi mencakup model peran yang terlihat, komunikasi mengenai harapan etis, pelatihan etis, hukuman untuk tindakan tidak etis, serta mekanisme perlindungan etika. Tabel 3.5 menunjukkan item yang digunakan untuk menilai budaya organisasi.

Tabel 3.5 Indikator Variabel Budaya Organisasi

Variabel	Indikator	Sumber
Budaya Organisasi	Modelan peran yang <i>visible</i> Komunikasi harapan etis Pelatihan etis Hukuman bagi tindakan etis Mekanisme perlindungan etika	Robbins (2013)

3.4.1.5 E-Procurement

Menurut Afolabi *et al.*, (2022), *e-procurement* adalah suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-Procurement* dapat diterapkan dalam proses penjualan dan pembelian yang dilakukan secara online dengan tujuan supaya lebih efisien dan efektif. *E-Procurement* dapat mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam suatu bisnis.

Tabel 3.6 Indikator Variabel *E-Procurement*

Variabel	Indikator	Sumber
<i>E-Procurement</i>	Meningkatkan transparansi Akuntabilitas Meningkatkan akses pasar Persaingan usaha yang sehat Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan Mendukung proses monitoring dan audit Memenuhi kebutuhan akses Informasi yang <i>real time</i>	Perpres No.16 Tahun 2018

3.4.2 Variabel Dependen

Fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan cara mendapatkan

keuntungan individu atau kelompok dengan tujuan tertentu yang sifatnya menipu atau berbohong serta merugikan pihak lain seperti adanya salah pernyataan, manipulasi laporan keuangan, penyajian informasi yang salah atau keliru (Wilopo, 2006). Tabel 3.7 menyajikan item-item yang digunakan untuk mengukur *fraud*.

Tabel 3.7 Indikator Variabel *Fraud*

Variabel	Indikator	Sumber
<i>Fraud</i>	a. Memanipulasi b. Membuat dokumen palsu c. Menghilangkan informasi d. Mencuri aset e. Melanggar prinsip akuntansi	Wilopo (2006)

3.5. Teknik Pengujian Hipotesis

3.5.1 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan dua cara pengolahan data yaitu, analisis deskriptif dan analisis yang lebih mendalam. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberi informasi tentang karakteristik utama dari variabel yang diteliti berdasarkan responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang data dengan melihat nilai maksimum dan minimum. Analisis yang lebih mendalam dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel yang bergantung dan yang bergantung dan yang tidak bergantung dengan bantuan program statistik SPSS versi 25.

3.5.1.1 Teknik Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif dipakai untuk memberikan informasi mengenai karakteristik utama dari variabel yang diteliti berdasarkan responden. Statistik deskriptif menggambarkan data dengan cara yang mudah dipahami. Analisis ini bisa ditunjukkan dalam bentuk diagram dalam bentuk diagram yang diambil dari tabulasi kuesioner di *excel* dan ditampilkan dalam bentuk diagram pai atau diagram lainnya.

3.5.1.2 Teknik Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan data angka yang berasal dari tabulasi *excel* dianalisa dengan aplikasi SPSS untuk mengetahui informasi tentang variabel-

variabelnya.

3.5.2 Pengujian Kualitas Data

Menurut Ghozali (2016), variabel yang dipakai di penelitian ini adalah variabel laten atau tidak terlihat (sering disebut konstruk), yaitu variabel yang tidak diukur secara langsung tetapi terbentuk melalui beberapa dimensi atau indikator. Sebelum diproses lebih lanjut, data harus diuji kualitasnya dengan tes validitas dan reliabilitas.

3.5.2.1 Uji Validitas

Ghozali (2016) menyebutkan bahwa uji validitas adalah cara untuk mengukur apakah kuesioner itu sah atau valid. Kuesioner dianggap valid jika pertanyaan di dalamnya dapat menggambarkan apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bisa dilakukan dengan cara menghitung korelasi pearson, yang melihat seberapa besar hubungan antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan kuesioner. Kuesioner dianggap valid jika pertanyaan didalamnya dapat menggambarkan apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bisa dilakukan dengan cara menghitung *korelasi pearson*, yang melihat seberapa besar hubungan antara nilai diperoleh dari pertanyaan kuesioner. Menurut Ghozali (2016), jika nilai signifikansi *pearson correlation* dibawah 0,05, itu berarti data yang diperoleh sah atau valid.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2016) mengatakan bahwa reliabilitas adalah cara untuk mengukur konsistensi kuesioner sebagai indikator dari variabel. Kuesioner dianggap *reliabel* jika seseorang memberikan jawaban yang sama dalam pertanyaan yang berbeda, sehingga hasilnya bisa konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2016), ada dua cara untuk mengukur uji validitas yaitu:

1. *Repeated measure*, yaitu memberi pertanyaan yang sama pada satu responden di dua waktu yang berbeda dan melihat seberapa konsisten jawaban mereka.
2. *One shot*, yaitu mengukur korelasi antara jawaban responden dengan menggunakan

nilai *cronbach alpha*. Jika variabel itu *reliabel*, nilai *cronbach alpha*-nya diatas 0,60.

3.5.2.3 Uji t

Uji t tersebut tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Penghitungan uji t dilakukan menggunakan program SPSS. Ada kriteria untuk menolak hipotesa sebagai berikut:

1. Jika t hitung lebih besar dari t tabel atau p value kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
2. Jika nilai t yang dihitung lebih kecil dari nilai t dalam tabel atau nilai p lebih besar, maka kita terima Ho dan tolak Ha. Ini berarti tidak ada pengaruh yang penting dari variabel bebas (X) pada variabel terikat (Y).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Dalam bagian ini, kita akan membahas cara mencegah penipuan pada Pemerintah Kota Tidore. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel dengan menyebarkan kuesioner dan diolah data dari responden yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Tidore yang terdiri dari 38 Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa diantaranya pelaku pengadaan Barang dan jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Penyedia Barang Atau Jasa Pemerintah (Penyedia), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan). Hasil dari penelitian yang dibahas di bagian ini mencakup: 1) penjelasan tentang responden yang diambil dari kuesioner yang sudah dikumpulkan; 2) hasil pengujian kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas); 3) hasil pengujian variabel secara individu melalui uji-t, serta pengujian secara bersamaan menggunakan uji f, uji koefisien determinasi (*r-square*), dan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan uji normalitas.

Dalam penelitian ini, ada dua hal yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, etika, budaya organisasi, *e-procurement* (X), sedangkan variabel terikat pada penelitian adalah *fraud*.

Dalam penelitian ini, ada dua hal yang diteliti yaitu pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Tidore (Y). Penelitian ini memakai kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner ini bertujuan untuk melihat apakah ada

pengaruh dari sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, etika, budaya organisasi, dan *e-procurement* terhadap penipuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Untuk memperoleh data tentang implementasi sistem pengendalian internal, sumberdaya manusia, etika, budaya organisasi, dan *e-procurement* (X) dihubungkan dengan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dihubungkan dengan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tidore (Y). Peneliti membuat alat ukur yang terdiri dari 33 pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Alat ukur ini mencakup indikator-indikator penipuan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tidore, dengan 5 pertanyaan yang meminta responden untuk memberi tanda centang pada pilihan (SS) untuk sangat tidak setuju, (TS) untuk tidak setuju, (ATS) untuk agak tidak setuju, (AS) untuk agak setuju, (S) untuk setuju, dan (SS) untuk sangat setuju. Penelitian ini dilakukan dengan sampel sebanyak 30 orang. Dari hasil pengolahan data kuesioner, menunjukkan untuk variabel pelaksanaan sistem pengendalian internal terdapat 162 jawaban yang memilih sangat setuju (SS), 441 setuju (S), 122 agak setuju (AS), 36 agak tidak setuju (ATS), 23 tidak setuju (TS), 2 sangat tidak setuju (STS). Sumber daya manusia terdapat jawaban 217 sangat setuju (SS), 436 setuju (S), 76 agak setuju (AS), 34 agak tidak setuju (ATS), 17 tidak setuju (TS), 6 sangat tidak setuju (STS). Etika terdapat 189 sangat setuju(SS) , 216 setuju (S), 44 agak setuju (AS), 18 agak tidak setuju (ATS), 13 tidak setuju (TS) dan 2 sangat tidak setuju (STS). *E-Procurement* terdapat 317 sangat setuju (SS), 590 setuju (S), 101 agak setuju (AS), 26 agak tidak setuju (ATS), 11 tidak setuju(TS), 3 sangat tidak setuju (STS). Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terdapat jawab 140 sangat setuju (SS), 367 setuju (S), 102 agak setuju (AS), 48 agak tidak setuju (ATS), 3 tidak setuju (TS), 0 sangat tidak setuju (STS).

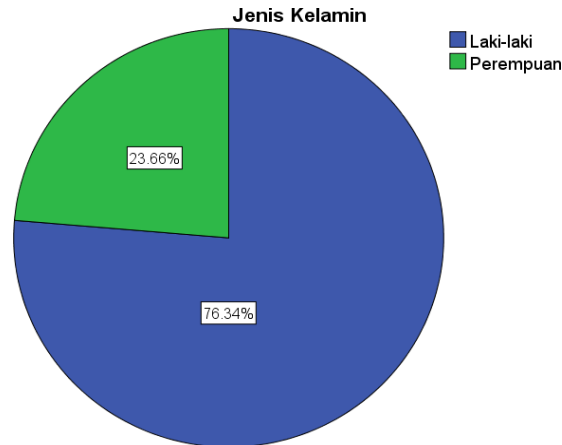
4.1.2 Deskripsi Responden

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti memberikan kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD Pemerintah Kota Tidore. Data dari kuesioner yang diambil dari

responden yang diteliti adalah sebagai berikut $(5-10) \times 25 = 130$.

4.2 Deskripsi Responden

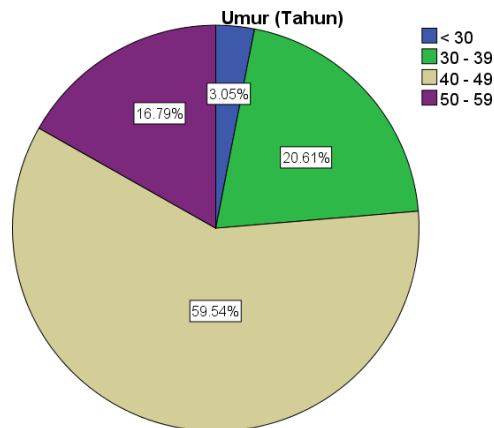
4.2.1 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam gambar di atas, terlihat bahwa responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki dengan persentase yang tinggi 76,3% atau 100 responden, sedangkan persentase perempuan hanya 23,7% atau sebanyak 31 responden.

4.2.2 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia

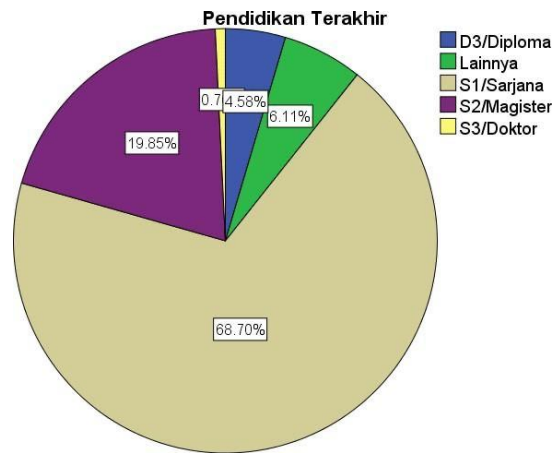


Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa responden yang paling banyak berasal dari kelompok usia 40 hingga 49 tahun dengan jumlah 78 orang (59,5%). Usia responden yang kedua terbanyak adalah 30-39 tahun dengan jumlah 27 orang (20,6%), lalu diikuti oleh usia 50-59

tahun sebanyak 22 orang (16,8%). Sedangkan usia <30 tahun sebanyak 4 responden (3,1%).

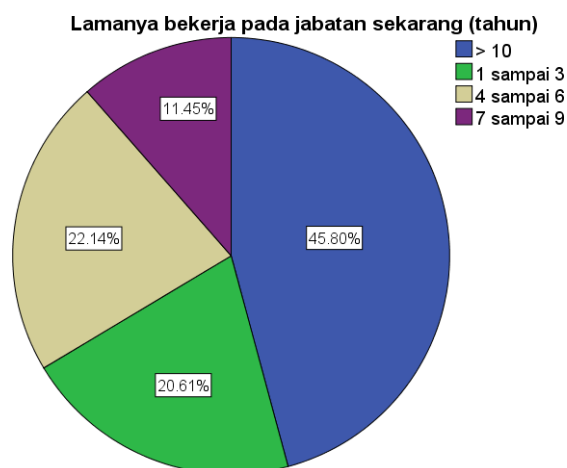
4.2.3 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan



Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan analisis deskriptif responden penelitian, dapat diketahui responden yang paling banyak berpendidikan terakhir adalah Sarjana dengan sebanyak 90 responden yaitu persentase 68,7%. kemudian responden yang menempuh pendidikan Magister sebanyak 26 atau (19,8%). Sedangkan yang berpendidikan lainnya sebanyak 8 responden (6,1%), yang menempuh pendidikan terakhir Diploma ada 6 responden (4,6%) dan yang menempuh pendidikan Doktor ada 1 responden (0,8%).

4.2.4 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Masa Kerja



Gambar 4.4 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja

Melihat data di atas, sebagian besar responden mempunyai masa kerja lebih dari 10

tahun dengan persentase 45,8% (60 responden). Selanjutnya, ada 29 responden (22,1%) yang memiliki masa kerjanya antara 4-6 tahun, 27 responden (20,6%) dengan masa kerja 1-3 tahun, dan yang paling sedikit adalah responden dengan masa kerja 7-9 tahun, yakni 15 orang (11.5%).

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dapat dinyatakan valid jika nilai signifikansinya ada di bawah 0,05. Setiap pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal menunjukkan data yang valid karena nilai signifikansinya adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 dan hasil r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga pernyataan tersebut dikatakan valid 0,05 (Ghozali, 2016).

a. Validitas SPI

Tabel 4.1 Validitas Variabel SPI

Variabel	Item	r hitung	r – tabel (N+2)	sig (p-value)	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	0.799	0.444	0.000	Valid
	SPI2	0.832	0.444	0.000	Valid
	SPI3	0.801	0.444	0.000	Valid
	SPI4	0.704	0.444	0.001	Valid
	SPI5	0.752	0.444	0.000	Valid
	SPI6	0.942	0.444	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.1 Nilai signifikansinya adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, dan hasil analisis adapun r hitung lebih besar dari r tabel, menjadikan pernyataan tersebut valid. Signifikansinya $0,000 < 0,05$ dan hasil r hitung $> r$ tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

b. Validitas Sumber Daya Manusia

Tabel 4.2 Validitas Variabel SDM

Variabel	Item	r hitung	r – tabel (N+2)	sig (p- value)	Keterangan
Sumber Daya Manusia	SDM1	0.577	0.444	0.008	Valid
	SDM2	0.826	0.444	0.000	Valid
	SDM3	0.782	0.444	0.000	Valid
	SDM4	0.895	0.444	0.000	Valid
	SDM5	0.833	0.444	0.000	Valid
	SDM6	0.817	0.444	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.2 Nilai signifikansinya adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, dan hasil analisis adapun r hitung lebih besar dari r tabel, menjadikan pernyataan tersebut valid. Signifikansinya $0,000 < 0,05$ dan hasil r hitung $> r$ tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

c. Variabel Etika

Tabel 4.3 Validitas Variabel Etika

Variabel	Item	r hitung	r – tabel (N+2)	sig (p- value)	Keterangan
Etika	ET1	0.671	0.444	0.001	Valid
	ET2	0.797	0.444	0.000	Valid
	ET3	0.748	0.444	0.000	Valid
	ET4	0.784	0.444	0.000	Valid
	ET5	0.887	0.444	0.000	Valid
	ET6	0.756	0.444	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Dalam tabel 4.3 mengenai validitas variabel etika, terlihat bahwa setiap pernyataan dalam variabel etika telah menghasilkan nilai yang valid. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 dan r hitung lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut valid.

d. Variabel Budaya Organisasi

Tabel 4.4 Validitas Variabel Budaya Organisasi

Variabel	Item	r hitung	r – tabel (N+2)	sig (p-value)	Keterangan
Budaya Organisasi	BO1	0.878	0.444	0.000	Valid
	BO2	0.920	0.444	0.000	Valid
	BO3	0.869	0.444	0.000	Valid
	BO4	0.776	0.444	0.000	Valid
	BO5	0.776	0.444	0.000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4, setiap pernyataan mengenai budaya organisasi juga menghasilkan hasil yang valid. Ini dikarenakan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan hasil r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga pernyataan tersebut valid.

e. Variabel *E-Procurement*

Tabel 4.5 Validitas Variabel E- Procurement

Variabel	Item	r hitung	r – tabel (N+2)	sig (p-value)	Keterangan
E-Procurement	EP1	0.684	0.444	0.001	Valid
	EP2	0.857	0.444	0.000	Valid
	EP3	0.708	0.444	0.000	Valid
	EP4	0.763	0.444	0.000	Valid
	EP5	0.888	0.444	0.000	Valid
	EP6	0.888	0.444	0.000	Valid
	EP7	0.888	0.444	0.000	Valid
	EP8	0.852	0.444	0.000	Valid
	EP9	0.852	0.444	0.000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel Variabel *e-procurement*, terlihat bahwa setiap pernyataan dalam Variabel *e-procurement* juga berbuah hasil yang valid. Ini karena nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pernyataan tersebut dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah alat ukur yang digunakan bisa

digunakan lebih dari 1 kali. Minimal, jika dilakukan oleh responden yang sama, hasilnya akan konsisten. Reliabilitas adalah kriteria yang menunjukkan nilai konsistensi alat ukur tersebut mencirikan tingkat konsistensi. Nilai Reliabilitas ditetapkan dengan koefisien *Alpha Cronbach* berdasarkan standar batas terendah reliabilitas yaitu 0,6. Apabila kriteria dari pengujian terpenuhi maka kuesioner dari penelitian tersebut reliabel.

Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha Cronbach's	Nilai Kritis	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Internal	0.892	0.6	Reliabel
2	Sumber Daya Manusia	0.879	0.6	Reliabel
3	Etika	0.856	0.6	Reliabel
4	Budaya Organisasi	0.889	0.6	Reliabel
5	E-Procurement	0.937	0.6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2025

Hasil uji reliabilitas berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu sistem pengendalian internal (0.892), sumber daya manusia (0.879), Etika (0.856), budaya organisasi (0.889), serta *e-procurement* (0.937), memiliki nilai koefisien *alpha cronbach's* yang lebih tinggi dari nilai kritis 0.6. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian untuk semua variabel tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan dinyatakan reliabel. Nilai *alpha cronbach's* yang mendekati 1, terutama pada *e-procurement* (0.937), menunjukkan tingkat keandalan yang sangat tinggi, sehingga instrument ini dapat dipercaya, untuk mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten. Dengan demikian, seluruh variabel memenuhi syarat reliabilitas dan layak digunakan dalam penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi ketika menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik umumnya bermacam-macam tetapi untuk data *cross section* yang utama digunakan antara lain uji multikolinearitas dan uji normalitas.

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas tujuannya untuk mengetahui apakah ada masalah multikolinearitas, kita bisa melihat nilai tolerance dan VIF atau faktor inflasi varians di hasil regresi. Jika nilai tolerance tersebut lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, itu berarti kita tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SPI	0.501	1.995
Sumber Daya Manusia	0.447	2.236
Etika	0.318	3.143
Budaya Organisasi	0.403	2.480
<i>E-Procurement</i>	0.472	2.119

Sumber : Data primer diolah, 2025

Hasil uji multikolinieritas pada model regresi yang ditunjukkan dalam tabel *coefficients* menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas yang signifikan antara variabel independen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* yang berada di atas batas minimum 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang berada di bawah batas maksimum 10. Secara rinci, nilai *tolerance* berkisar antara 0,318 hingga 0,501, sedangkan nilai VIF berkisar antara 1,995 hingga 3,143. Meskipun variabel etika (X3) memiliki VIF tertinggi (3,143), nilai ini masih jauh di bawah ambang kritis 10, sehingga masih dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi tinggi antara variabel bebas dalam model ini, dan setiap variabel dapat diinterpretasikan kontribusinya secara independen terhadap variabel dependen pencegahan *fraud* (Y).

4.4.2 Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas adalah cara untuk melihat apakah model kita mengikuti distribusi normal atau tidak. Kita bisa melakukan pengujian ini dengan menggunakan *statistik kolmogorov smirnov*. Jika alpha dari pengujian *kolmogorov smirnov* lebih dari 0,5, maka kita bisa katakan

bahwa model memiliki distribusi normal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		131
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.99165864
	Absolute	.105
Most Extreme Differences	Positive	.105
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.202
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test* terhadap unstandardized residual menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,111 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model ini memenuhi asumsi normalitas, yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi untuk memastikan validitas inferensi statistik.

4.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Hasil koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square
Regresi	0.658	0.644

Sumber: Data primer diolah (2025).

Pada tabel 4.9 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0,644, yang menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari sistem pengendalian internal (X1), sumber daya manusia (X2), etika (X3), budaya organisasi (X4), dan *e-procurement* (X5) secara

bersama-sama mempengaruhi variabel pencegahan *fraud* (Y) sebesar 64,4%, sisanya sebesar 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.095	1.531		1.368	.174		
Sistem Pengendalian Internal (X1).	.137	.053	.190	2.569	.011	.501	1.995
1 Sumber Daya Manusia (X2)	.114	.056	.158	2.020	.046	.447	2.236
Etika (X3)	.139	.065	.199	2.148	.034	.318	3.143
Budaya Organisasi (X4)	.178	.082	.179	2.166	.032	.403	2.480
E- Procurement (X5)	.154	.047	.251	3.294	.001	.472	2.119

a. Dependent Variable: Pencegahan fraud (Y)

Persamaan yang dapat dibentuk dari hasil perhitungan uji regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,095 + 0,137 X1 + 0,114 X2 + 0,139 X3 + 0,178 X4 + 0,154 X5$$

Keterangan :

Y = Pencegahan *Fraud*

X1 = SPI

X2 = Sumber Daya Manusia

X3 = Etika

X4 = Budaya Organisasi

X5 = *E- Procurement*

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, maka dapat dijelaskan makna dari nilai konstanta dan nilai koefisien regresi yang terstandarisasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (Y) adalah sebesar 2,095, artinya jika tidak ada pengaruh dari variabel sistem pengendalian internal (X1), sumber daya manusia (X2), etika (X3), budaya organisasi (X4), dan *e-procurement* (X5) terhadap pencegahan *fraud* (Y), maka nilai pencegahan fraud akan tetap konstan sebesar 2,095.
2. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X1) sebesar 0,137, berarti

- apabila sistem pengendalian internal (X1) meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,137 dengan asumsi variabel sumber daya manusia (X2), etika (X3), budaya organisasi (X4), dan *e-procurement* (X5) tetap konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X2) sebesar 0,114, berarti apabila sumber daya manusia (X2) meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,114 dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal (X1), etika (X3), budaya organisasi (X4), dan *e-procurement* (X5) tetap konstan.
 4. Nilai koefisien regresi variabel etika (X3) sebesar 0,139, berarti apabila etika (X3) meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,139 dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal (X1), sumber daya manusia (X2), budaya organisasi (X4), dan *e-procurement* (X5) tetap konstan.
 5. Nilai koefisien regresi variabel budaya organisasi (X4) sebesar 0,178, berarti apabila budaya organisasi (X4) meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,178 dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal (X1), sumber daya manusia (X2), etika (X3), dan *e-procurement* (X5) tetap konstan.
 6. Nilai koefisien regresi variabel *e-procurement* (X5) sebesar 0,154, berarti apabila *e-procurement* (X5) meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,154 dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal (X1), sumber daya manusia (X2), etika (X3), dan budaya organisasi (X4) tetap konstan.

4.6.2 Uji f

Tabel 4.11 Hasil Uji f

Variabel Independen	F-hitung	F-tabel	p-value	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Etika (X3), Budaya Organisasi (X4), <i>E-procurement</i> (X5)	48,021	2,290	0,000	Secara Serentak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data primer diolah (2025).

Hasil uji F menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} = 48,021 > F\text{-tabel} = 2,290$ dan signifikansi $F = 0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut artinya, sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, etika, budaya organisasi, dan *e-procurement* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hipotesis keenam penelitian yang menyatakan “variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*” terbukti secara statistik.

4.6.3 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yang meliputi sistem pengendalian internal (X1), sumber daya manusia (X2), etika (X3), budaya organisasi (X4), dan *e-procurement* (X5) memiliki pengaruh secara parsial (individu) terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan *fraud* (Y). Hasil Uji t menunjukkan bahwa:

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Variabel	t- hitung	t- tabel	p- value	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	2.569	1.980	0.011	Berpengaruh positif signifikan
Sumber Daya Manusia (X2)	2.020	1.980	0.046	Berpengaruh positif signifikan
Etika (X3)	2.148	1.980	0.034	Berpengaruh positif signifikan
Budaya Organisasi (X4)	2.166	1.980	0.032	Berpengaruh positif signifikan
E-Procurement (X5)	3.294	1.980	0.001	Berpengaruh positif signifikan

4.7 Pembahasan hasil penelitian

4.7.1 Sistem Pengendalian Internal (SPI) positif untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa

Sistem Pengendalian Internal (X1) memiliki $t\text{-hitung} = 2,569 > t\text{-tabel} = 1,980$ dan $p\text{-value} = 0,011 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian yang menyatakan “sistem pengendalian internal berpengaruh

positif terhadap pencegahan *fraud* didukung oleh data.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian internal merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dilakukan oleh para pemimpin dan seluruh karyawan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien, serta laporan keuangan yang dapat diandalkan. Ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja lembaga secara berkelanjutan. Selain itu, lembaga pemerintah melakukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi risiko baik dari dalam maupun luar. Mereka juga melakukan analisis risiko dengan mengklarifikasikan risiko dari yang tinggi hingga rendah berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil penelitian ini akan digunakan oleh pemimpin untuk membuat keputusan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan melakukan pengawasan/pemantauan dan mengevaluasi seluruh aktivitas operasional yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja instansi secara berkesinambungan. Selain hal tersebut instansi pemerintah melakukan penilaian risiko antara lain dengan mengidentifikasi resiko baik dari faktor internal ataupun eksternal dan dengan melakukan analisis risiko (penggolongan resiko dari tinggi ke rendah) yang berdasarkan dari potensi terjadi dan dampak yang ditimbulkan dimana hasil dari penilaian resiko ini nantinya digunakan oleh pimpinan sebagai dasar dari pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan teori *fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), Kecurangan terjadi karena 6 elemen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, kolusi kita bisa memahami bahwa kecurangan sering terjadi karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, kontrol yang ketat dan prosedur audit yang baik kita bisa mengurangi tekanan dan rasionalisasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Dalam pengadaan barang dan jasa, sistem ini bisa

digunakan dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan untuk menurunkan risiko kecurangan di Pemerintah Kota Tidore.

Penelitian yang dilakukan Linda (2021); Granita (2002); Gita (2024); Erika (2019); Yusni (2022); Mutiara (2023); Marsita (2020); Made (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi dengan signifikan pada terjadinya tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Semakin baik sistem pengendalian internal yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan di Pemerintah Kota Tidore maka tindakan *fraud* pengadaan barang jasa dapat diminimalkan.

4.7.2 Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa

Sumber daya manusia (X2) memiliki $t\text{-hitung} = 2,020 > t\text{-tabel} = 1,980$ dan $p\text{-value} = 0,046 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya, sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. dengan demikian, hipotesis kedua penelitian yang menyatakan “sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*” didukung oleh data.

Menurut Nurhajanti (2017), kualitas sumberdaya manusia sangat penting dan harus mencakup integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi dalam suatu organisasi yang melakukan pengadaan barang dan jasa ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menghadapi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan sekaligus untuk mendukung daya saing di era globalisasi, sumber daya manusia yang unggul akan menjadi aset instansi pemerintah. Kualitas sumber daya manusia yang mau menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian masing masing dapat disimpulkan bahwa keahliannya masing-masing tersebut menjadi point sendiri dalam meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi, sumber

daya manusia yang menjadi tenaga kerja sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tentunya harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis dalam pengadaan barang dan jasa (Lestari, 2022).

Dengan mengadopsi *fraud hexagon theory* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi ketika terdapat tekanan yang signifikan, kesempatan yang ada dan didukung oleh individu yang memiliki integritas rendah ketrampilan yang dimiliki individu untuk melakukan tindakan *fraud* tinggi, sikap aroganisme dan kolusi maka kualitas sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa yang kurang baik menjadi peluang (*opportunity*) yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan dan dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat dapat menolak rasionalisasi dan menolak tekanan untuk berbuat curang. Di Pemerintah Kota Tidore kualitas sumber daya manusia juga memiliki tanggung jawab untuk memilih mitra yang menyediakan barang dan layanan serta membuat kesepakatan kontrak. Agar pengadaan dapat dilakukan dengan baik, efisien, jelas dapat dipertanggung jawabkan, sumber daya manusia dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu memiliki kejujuran, kemampuan, kemandirian, dan sikap yang adil (Celentani dan Ganuza, 2001).

Penelitian yang mendukung dilakukan oleh Linda (2021); Gita (2024) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh besar terhadap terjadinya kecurangan pengadaan barang /jasa. Supaya tetap terjaga proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kota Tidore dapat meningkatkan kompetensi terkait pemahamannya tentang proses pengadaan barang dan jasa dengan rutin meningkatkan kompetensi dengan adanya pelatihan, menerapkan sertifikasi profesi pengadaan barang dan jasa kepada semua pegawai yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa maksud dan tujuan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore dapat tercapai secara maksimal sehingga integritas, independensi dan objektivitas tetap terjaga dengan baik.

4.7.3 Etika berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Etika (X3) memiliki $t\text{-hitung} = 2,148 > t\text{-tabel} = 1,980$ dan $p\text{-value} = 0,034 < 0,05$, sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya, etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan “etika berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*” didukung oleh data. Etika dalam pengadaan juga merupakan salah satu aspek yang penting dan perlu diperhatikan untuk menciptakan pengadaan pemerintah yang sehat.

Dengan menggunakan teori *fraud hexagon* dari Vousinus (2019), kita bisa melihat bahwa jika seseorang tidak memiliki etika yang baik, ada kemungkinan kesempatan untuk terjadinya kecurangan (*opportunity*), dengan adanya etika pengadaan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak dapat merugikan negara. Dan dengan etika yang baik mendorong perilaku etis diantara karyawan sehingga meminimalkan sikap arogansi dan menolak rasionalisasi untuk melakukan tindakan kecurangan.

Peneliti yang mendukung Linda (2019) mengatakan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa dengan meminimalkan praktek yang tidak sehat antara lain: a) Memberikan penghargaan atau hadiah kepada panitia pengadaan atau staf instansi yang mengatur kegiatan pengadaan. Peserta pengadaan yang tidak memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melakukan pekerjaan tersebut (mereka hanya berfungsi sebagai perantara). Diskon diberikan secara diam-diam kepada anggota panitia pengadaan atau pihak dari instansi yang menyelenggarakan proses pengadaan (Hidayati, 2017). Maka dari itu semakin baik etika pegawai di bagian pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore dapat menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk integritas dan transparan.

4.7.4 Budaya Organisasi memberi dampak positif untuk mencegah penipuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Budaya organisasi (X4) memiliki $t\text{-hitung} = 2,166 > t\text{-tabel} = 1,980$ dan $p\text{-value} = 0,032 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sesuai dengan *Fraud Hexagon Theory* dimana organisasi perlu mendorong dan mendukung budaya etis di kalangan pegawai melalui pelatihan, kebijakan, dan sistem pengendalian internal yang kuat. Dengan demikian, perilaku etis akan menjadi bagian integral dari operasional harian yang membantu menekan peluang terjadinya *fraud*. Dengan adanya budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dan pentingnya budaya organisasi menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku prososial individu akan termotivasi untuk tidak bersikap arogansi dan kolusi. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya *fraud* pada bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tidore artinya, semakin baik budaya organisasi yang terjadi di bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tidore berargumen bahwa sistem pengendalian internal dan prosedur yang ketat lebih berpengaruh dalam mencegah *fraud* daripada aspek budaya semata. Menurut mereka, tanpa kontrol yang ketat, budaya organisasi yang baik pun tidak cukup untuk sepenuhnya mencegah *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopiyan dkk. (2021) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mengurangi perilaku *fraud* dengan menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika dan integritas. Penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja dalam budaya yang menekankan integritas cenderung kurang terlibat dalam tindakan *fraud* karena adanya tekanan sosial dan normatif untuk berperilaku jujur.

4.7.5 E-Procurement berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

E-Procurement (X5) memiliki $t\text{-hitung} = 3,294 > t\text{-tabel} = 1,980$ dan $p\text{-value} = 0,001 < 0,05$, sehingga H_{0s} ditolak dan H_{as} diterima. Artinya, *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hipotesis kelima penelitian yang menyatakan “*e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*” didukung oleh data.

Menurut Croom dan Jones (2007), *e-procurement* adalah tentang memakai teknologi informasi untuk kegiatan belanja, termasuk mencari barang, bernegosiasi tentang pesanan, dan membeli. Tujuan utama dari *e-procurement* adalah untuk mencegah terjadinya penipuan. Ini karena *e-procurement* bisa mengurangi jumlah pertemuan antara tim pengadaan dan penyedia barang atau peserta, sehingga praktik-praktik tidak jujur yang sering terjadi dalam proses belanja barang dan jasa bisa dicegah.

Dalam konsep *fraud hexagon theory* kecurangan pada pengadaan barang dan jasa disebabkan karena (*opportunity*). Berkaitan dengan adanya *e-procurement* tentunya dapat meminimalkan kesempatan, peluang untuk melakukan penipuan tidak hanya muncul karena tekanan, tetapi karena pelaku penipuan melihat ada kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Ada beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu: a) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang menyimpang; b) Ketidakmampuan untuk menilai Kualitas kinerja yang baik; Kegagalan dalam memberikan sanksi sanksi pada pelaku penipuan; Kurangnya informasi; Ketidakpedulian, ketidakacuhan, dan ketidakmampuan; Kurangnya jejak audit (Iqbal dan Murtanto, 2016).

Inti dari sistem *e-procurement* dalam proses pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota

Tidore. Dengan adanya *e-procurement* di Pemerintah Kota Tidore diharapkan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, bersaing, transparansi, adil dan tanggung jawab.

Hasil dari penelitian ini mendukung yang dilakukan oleh Linda (2021); Erika (2019); Yusni (2022); Mutiara *et al.*, (2023); Irene (2021); Mu'ah (2023) menyatakan bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Semakin baik penerapan *e-procurement* semakin tinggi pula pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa maka dari itu untuk menelaraskan semua instansi untuk menerapkan *e-procurement* di Pemerintah Kota Tidore dapat mengadakan pelatihan untuk semua karyawan agar mereka memahami cara pelaksanaan *e-procurement* sehingga sumber daya dapat mendukung sistem ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, etika, budaya organisasi dan *e-procurement* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore dengan nilai T – statisik yang menunjukkan hubungan signifikan dan kuat.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat baik, dengan nilai R square yang tinggi, dimana menunjukkan pengaruh variabel-variabel yang diteliti signifikan secara keseluruhan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil analisis, diharapkan dapat dijadikan referensi baru dan memberikan saran-saran. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tidore dengan harapan bahwa pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Tidore dapat terhindar dari tindakan kecurangan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel dan menambah jumlah responden untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menambah wawasan mengenai pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian. Batasan dalam penelitian yaitu:

1. Jurnal ilmiah untuk membantu penelitian ini masih terbatas jumlahnya.
2. Tidak dilakukan wawancara dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu dan

kesibukan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

3. Penelitian ini hanya berlangsung di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tidore. Jadi, penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atau digunakan untuk semua objek tentang pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif.

5.4 Saran

Adapun saran pada pada penelitian ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi *fraud*, selain dari sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, etika, budaya organisasi dan *e-procurement*, oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *fraud* selain variabel yang diteliti oleh peneliti.

Bagi peneliti berikutnya, alangkah baiknya peneliti menambahkan faktor lain yang berkaitan dengan penilaian proses pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, ruang lingkup penelitian diperluas tidak di tingkat pemerintahan kota , tetapi juga membandingkan dengan satu tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi, Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa. (2018). *Peraturan Presiden. Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia (33).
- Albrecht, W., S. and Conan C., A., et.al. (2009). *Fraud Examination*. Edisi 4 Masonohio: South-Western Cengage Learning.
- Amelia, W. (2021). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Government (Studi Kasus Pemkab Lamongan)*. (Skripsi – S1, Fakultas Teknis dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan).
- Andari, M., W. (2020). *Pengaruh Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan Fraud*. (Tesis – S2, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Association Certified Fraud Examiner (ACFE). 2012. *Report to the Nations on Occupational Fraud*.
- Agustina, C., Rini, Y. P., & Yuliadi, E., T. (2021). Pengaruh Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP di wilayah Tangerang Selatan dan Tangerang). *ECO-FIN*, 3 (2), 243-256.
- Basri, Y. M. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50-73.
- Celentani, M., & Ganuza, J.-J. (2001). *Corruption and competition in procuremen*.
- Cahyani, E. N. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(7), 1-13.
- Croom, S., & Brandon-Jones, A. (2007). Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 13 (4), 294–303. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2007.09.015>
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDJIT)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Fuad, K., Lestari, A. B., & Handayani, R. T. (2020). Fraud Pentagon as a Measurement Tool for Detecting Financial Statements Fraud. *Atlantis Press*, 115, 85–88. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200127.017>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, D. (2016). *Psikologi*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Eighth Edition. United Kingdom: Annabel Ainscow.
- Hall, James A. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi keempat. Salemba Empat.

- Hidayati, N., & Mulyadi, J., M., V. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa*. Riset Akuntansi Dan Perpajakan, JRAP, 4 (2), 275-294.
- Khana, A., & Arora, B. (2009). A Study To Investigate The Reason For Bank Frauds And The Implementation Of Preventive Security Controls In Indian Banking Industry. *International Journal Of Business Science And Applied Management*, 4(3), 2-21.
- KPK. (2014). *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Empat*. Jakarta: Erlangga.
- Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE)*, 3(2), 43-60.
- Lestari, L., & Yuliani, N. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*. <https://journal.unimma.ac.id>
- Mulyadi. (2017). *Pengertian Sistem Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulqiani, D. (2021). Peran Inspektorat Dalam Pencegahan *Fraud* Di Lingkungan Pemerintahan. (Skripsi – S1. Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Mu'ah, Masram, Wiwik, A., Sayyid, M., & Mas'adah. (2024). Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Owner*, 8(2), 1810–1822. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2065>
- Ningrum, G. D. M. S., & Triani, N. Y. A. (2022). Persepsi Pegawai Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4 (11), 1-8. <https://Journal.Ikopin.Ac.Id/Index.Php/Fairvalue>
- Okaviani, F., & Reskino. (2023). Financial Statement Fraud: Pengujian Fraud Hexagon Dengan Moderasi Audit Committee. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25 (1), 91-118. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Purba, B.P. (2015). *Fraud Dan Korupsi; Pencegahan, pendeteksian, dan pemberantasannya*. Jakarta: Lestari Kirantama.
- Pope, J. (2007). *Strategi Membahas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Edisi II*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pramesti, M. A. D., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompensasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 78-95.
- Pratama, G. A., Rahmani, N. A. B., & Kusmilawaty. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Kasus Fraud/Kecurangan Akuntansi Dengan Pendekatan Fraud Hexagon (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2 (1), 49-68.

- Rahayu, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2023). Analysis of the Factors Affecting the Effectiveness of Preventing Fraud in The Procurement of Goods and Service (An Empirical Study on Regional Apparatus Organization of Pekanbaru City). *In Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 499- 509.
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2020). Financial Statements Fraud dengan Pendekatan Vicious Fraud Hexagon Model: Tinjauan pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1, 409–430.
- Sari, S. P., & Safitri, L. A. (2019). Tinjauan Tentang Manajemen Laba Dengan Fraud Triangle Theory Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15 (2), 19-33.
- Singleton. (2010). *Fraud Auditing And Forensic Accounting*. Fourth Edition Wiley Corporate F&A. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sulistiyorini, L. (2021). Pencegahan *Fraud* Di Perguruan Tinggi Swasta. (Tesis-S2. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program).
- Syalwa, M., Maria, M., & Kadarwati S. (2023). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas PUPR Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 1-8.
- Sohel Iqbal, M., & Seo, J.-W. (2008). *E-Governance as an Anti Corruption Tool: Korean Cases*. <http://web.worldbank.org>.
- Syah, S., & Supiani. (2024). Optimalisasi Kinerja Guru Melalui Manajemen Sekolah Dan Budaya Organisasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Pendidik Indonesia*, 5 (2), 84-97.
- Rae, K., Sands, J., & Subramaniam, N. (2017). Associations among the Five Components within COSO Internal Control-Integrated Framework as the Underpinning of Quality Corporate Governance. *AABFJ*, 11(1), 29- 52.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____ . (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangel And SAS. *Advances In Financial Economics*, 13(99), 53-81. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Robbins, S., & Judge, T. A. (2013). *Organization Behaviour Fifteenth Edition*. United States of America: Prentice Hall Person Educational International.
- Sasongko, N., & Wijyantika, S., F. (2019). Faktor Resiko Fraud Terhadap Pelaksanaan Fraudulent Financial Reporting (Berdasarkan Pendekatan Crown's Fraud Pentagon Theory). *JURNAL: Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4 (1), 67-76.
- Supriyanto, D. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E- Procurement, Sistem dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 131 – 141. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>
- Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 209-221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>.
- Tsani, F. F., & Yanti, H. B. (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan

- Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2 (9), 773-784.
- Tuankotta, T. M. (2014). *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>.
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wilopo, R. (2006). Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Prilaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan: Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Ventura*, 11(1), 85-100.
- Yusni. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 135-148.

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tidore

Assalamu'alaikum, Salam Sejahtera

Perkenalkan, Saya Erlen Yuharnis dari Program Studi Magister Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir mengenai "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tidore"

Dengan kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian saya dengan mengisi kuesioner yang diberikan. Semua jawaban dan identitas Bapak/Ibu/Saudara(i) akan dijamin penuh kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik saja.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yaitu pegawai pengadaan barang dan jasa Kota Tidore.

Akhir kata, terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam mengisi kuesioner ini.

DATA RESPONDEN

Isikan dengan huruf atau angka dan berilah tanda \surd (centang) atau X (silang) pada kotak yang tersedia.

1. Tuliskan minimal 2 huruf inisial nama Ibu/Bapak		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Jenis Kelamin: <i>Laki – Laki</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Perempuan</i>	<input type="checkbox"/>	
3. Umur (Tahun) :	< 30	<input type="checkbox"/>	40-49	<input type="checkbox"/>
	30 - 39	<input type="checkbox"/>	50 – 59	<input type="checkbox"/>

4. Pendidikan Terakhir: D3/Diploma	<input type="text"/>	S3/Doktor	<input type="text"/>
S1/Sarjana	<input type="text"/>	Lainnya (Mohon Diisi)	<input type="text"/>
S2/Magister	<input type="text"/>		

5. Lamanya bekerja pada jabatan sekarang:			
1 - 3	<input type="text"/>	7 - 9	<input type="text"/>
4 - 6	<input type="text"/>	10 <	<input type="text"/>

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum menjawab pertanyaan, mohon dibaca terlebih dahulu dengan seksama. Isilah kuisisioner tersebut sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu bekerja. Anda diminta untuk memilih jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan kolom yang tersedia.

Keterangan:

- STS: Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- ATS: Agak Tidak Setuju
- AS : Agak Setuju
- S: Setuju
- SS : Sangat Setuju

Pencegahan *Fraud* barang dan jasa

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1.	Tempat Bapak/Ibu bekerja menolak penggunaan dokumen fotokopian						
2.	Tempat Bapak/Ibu bekerja menghindari praktik praktik yang tidak lazim/mencurigakan						
3.	Tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan stok opname aset kantor secara periodik						
4.	Tempat Bapak/Ibu bekerja melampirkan bukti kuitansi setiap ada transaksi						
5.	Tempat Bapak/Ibu bekerja selalu memberikan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa						

1. Sistem Pengendalian Internal (SPI).

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1.	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki struktur organisasi, tugas dan wewenang sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan PBJ.						
2.	Tempat bapak/Ibu bekerja telah menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab pegawai PBJ.						
3.	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki rancangan struktur pengendalian internal yang baik dalam PBJ.						
4.	Tempat bapak/Ibu bekerja memiliki tujuan organisasi yang jelas untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam PBJ.						
5.	Tempat Bapak/Ibu bekerja rencana dan capaian kinerja PBJ telah direviu dan dievaluasi secara berkala.						
6.	Tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kondisi fisik asset PBJ secara berkala.						

2. Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1.	Pegawai terkait dengan PBJ telah tersertifikasi dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya.						
2.	Pegawai terkait dengan PBJ mempunyai pemahaman, pengetahuan yang baik mengenai sistem dan prosedur PBJ.						
3.	Pegawai terkait dengan PBJ mampu membuat analisis dan mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya.						
4.	Pegawai terkait dengan PBJ memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada atasan, rekan, pihak eksternal dan pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.						
5.	Pegawai terkait dengan PBJ memiliki semangat dalam mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait PBJ.						
6.	Pegawai terkaut dengan PBJ memegang teguh etika dan integritas dalam melaksanakan tugasnya.						

3. Etika

perlu diskusi langsung dan tolong disiapkan dasarnya (jurnal yang digunakan untuk menyusun item ini)

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1.	Pemerintah Kota Tidore menerapkan kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis yang dipatuhi oleh pegawai						
2.	Pegawai terkait dengan PBJ bertanggung jawab kepada profesi						
3.	Pegawai terkait dengan PBJ menghormati kepercayaan publik dan berkomitmen terhadap profesi.						
4.	Pegawai terkait dengan PBJ selalu beraktivitas secara professional						
5.	Pegawai terkait dengan PBJ bersikap adil, tidak memihak dan bebas dari pengaruh pihak lain						
6.	Pemerintah Kota Tidore akan memberi sanksi terhadap perilaku tidak etis yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa						

4. Budaya Organisasi

perlu diskusi langsung dan tolong disiapkan dasarnya (jurnal yang digunakan untuk menyusun item ini)

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1.	Saya sering berinovasi dan pimpinan juga mendorong untuk meningkatkan kreativitas dalam proses PBJ, sehingga PBJ dapat diselesaikan dengan cepat dan aman sesuai dengan visi dan misi.						
2.	Saya memahami dengan benar visi dan misi, sehingga saya memperhatikan setiap detil pekerjaan yang saya lakukan.						
3.	Saya selalu menekankan pada hasil kerja, tetapi tetap memperhatikan proses kerja yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal.						
4.	Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan, sehingga saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada agar tujuan PBJ dapat tercapai.						
5.	Adanya koordinasi yang baik antar unit di bagian PBJ.						

5. E- Procurement

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1.	<i>E-Procurement</i> dapat diakses oleh semua bagian PBJ dan mempermudah proses lelang.						
2.	<i>E-Procurement</i> adalah proses PBJ pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet yang tampilan alur websitenya sudah baik.						
4.	<i>E-Procurement</i> mengimplementasikan terjadi pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi berbasis digital antara panitia PBJ dengan para calon penyedia.						
6.	<i>E-Procuremnet</i> menjamin kecepatan akses informasi yang dapat diandalkan dan online <i>real time</i> .						
7.	<i>E-Procurement</i> menjaga akuntabilitas dalam proses PBJ.						
8.	<i>E-Procurement</i> memperbaiki tingkat efisiensi proses PBJ.						
9.	<i>E-Procurement</i> membuat persaingan lelang dalam PBJ semakin sehat dan kompetitif.						
10.	<i>E-Procurement</i> memudahkan perencanaan dan pengendalian dalam PBJ.						

Lampiran 2

Tabulasi Data

No	JK	Umur	Pendidikan	Lama bekerja	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	Total_SPI
1	1	3	3	4	6	6	5	5	5	5	32
2	1	3	2	4	5	5	5	5	5	5	30
3	2	1	2	1	5	5	5	5	5	5	30
4	2	3	2	4	6	6	5	6	6	6	35
5	2	3	2	3	6	5	5	4	5	5	30
6	2	1	1	1	5	5	5	5	5	5	30
7	1	3	2	4	6	6	6	6	5	6	35
8	1	3	2	2	5	5	5	5	5	5	30
9	1	3	3	1	4	5	5	5	5	4	28
10	1	3	2	2	6	5	6	5	6	6	34
11	1	3	5	1	5	5	5	5	5	5	30
12	1	3	1	4	5	5	5	5	5	5	30
13	1	1	2	1	5	4	4	5	5	4	27
14	1	4	2	3	6	6	6	6	6	6	36
15	1	3	2	3	5	5	5	5	5	5	30
16	1	3	2	1	5	5	5	5	4	4	28
17	1	3	2	1	5	5	5	5	5	5	30
18	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5	30
19	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	30
20	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5	30

No	JK	Umur	Pendidikan	Lama bekerja	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	Total_SDM
1	1	3	3	4	5	6	6	6	6	6	35
2	1	3	2	4	4	4	4	4	5	5	26
3	2	1	2	1	5	5	5	5	5	5	30
4	2	3	2	4	4	6	6	6	6	6	34
5	2	3	2	3	5	5	5	5	5	5	30
6	2	1	1	1	5	5	5	5	5	5	30
7	1	3	2	4	5	5	5	5	5	5	30
8	1	3	2	2	5	5	5	5	5	5	30
9	1	3	3	1	5	5	5	4	5	5	29
10	1	3	2	2	6	6	6	4	4	4	30
11	1	3	5	1	5	5	5	6	6	6	33
12	1	3	1	4	5	5	5	5	5	5	30
13	1	1	2	1	5	6	5	5	5	5	31
14	1	4	2	3	6	6	6	6	6	6	36
15	1	3	2	3	5	5	5	5	5	5	30
16	1	3	2	1	5	5	5	5	5	4	29
17	1	3	2	1	6	6	6	6	6	6	36
18	1	2	2	2	6	6	5	6	6	6	35
19	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	30
20	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	36

No	JK	Umur	Pendidikan	Lama bekerja	ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	Total_ET
1	1	3	3	4	6	6	6	6	6	6	36
2	1	3	2	4	4	5	5	5	5	5	29
3	2	1	2	1	5	5	5	6	5	5	31
4	2	3	2	4	6	6	6	6	6	6	36
5	2	3	2	3	5	5	5	5	5	5	30
6	2	1	1	1	5	5	5	5	6	6	32
7	1	3	2	4	5	5	5	5	6	6	32
8	1	3	2	2	5	5	5	5	5	5	30
9	1	3	3	1	5	5	5	5	5	4	29
10	1	3	2	2	6	6	6	5	6	5	34
11	1	3	5	1	5	5	6	5	6	6	33
12	1	3	1	4	5	5	5	5	5	5	30
13	1	1	2	1	5	5	5	5	5	5	30
14	1	4	2	3	6	6	6	6	6	6	36
15	1	3	2	3	5	5	5	5	5	5	30
16	1	3	2	1	6	6	3	5	5	5	30
17	1	3	2	1	6	6	6	6	6	6	36
18	1	2	2	2	5	6	6	6	6	6	35
19	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	30
20	1	2	2	2	5	6	6	6	6	5	34

No	JK	Umur	Pendidikan	Lama bekerja	BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	Total_BO
1	1	3	3	4	6	6	6	6	6	30
2	1	3	2	4	4	4	4	5	5	22
3	2	1	2	1	5	6	6	6	6	29
4	2	3	2	4	6	6	6	6	6	30
5	2	3	2	3	5	5	5	5	5	25
6	2	1	1	1	5	5	5	6	6	27
7	1	3	2	4	5	5	4	5	5	24
8	1	3	2	2	5	5	5	5	5	25
9	1	3	3	1	4	4	4	5	5	22
10	1	3	2	2	5	5	6	5	5	26
11	1	3	5	1	6	5	6	6	6	29
12	1	3	1	4	5	5	5	6	6	27
13	1	1	2	1	4	4	4	5	5	22
14	1	4	2	3	6	6	6	6	6	30
15	1	3	2	3	5	5	5	6	6	27
16	1	3	2	1	4	5	3	6	6	24
17	1	3	2	1	6	6	6	6	6	30
18	1	2	2	2	6	6	6	6	6	30
19	2	2	2	1	5	5	5	5	5	25
20	1	2	2	2	6	5	5	5	5	26

No	JK	Umur	Pendidikan	Lama bekerja	EP1	EP2	EP3	EP4	EP5	EP6	EP7	EP8	EP9	Total_EP
1	1	3	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
2	1	3	2	4	6	5	6	6	6	5	5	5	5	49
3	2	1	2	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
4	2	3	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
5	2	3	2	3	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
6	2	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	1	3	2	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	46
8	1	3	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
9	1	3	3	1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	43
10	1	3	2	2	5	6	5	5	6	6	6	6	6	51
11	1	3	5	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
12	1	3	1	4	6	6	5	5	6	6	6	6	6	52
13	1	1	2	1	5	5	5	6	6	6	6	6	6	51
14	1	4	2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
15	1	3	2	3	6	6	5	5	6	6	6	6	6	52
16	1	3	2	1	5	6	5	5	5	5	5	6	6	48
17	1	3	2	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
18	1	2	2	2	5	6	5	6	6	6	6	6	6	52
19	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	1	2	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	49

Lampiran 3

Hasil Olah Data

Validitas SPI

Correlations

		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	Total_SPI
SPI1	Pearson Correlation	1	.635**	.535*	.321	.535*	.751**	.799**
	Sig. (2-tailed)		.003	.015	.168	.015	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
SPI2	Pearson Correlation	.635**	1	.649**	.649**	.409	.685**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.003		.002	.002	.073	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
SPI3	Pearson Correlation	.535*	.649**	1	.474*	.474*	.759**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.015	.002		.035	.035	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
SPI4	Pearson Correlation	.321	.649**	.474*	1	.474*	.564**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.168	.002	.035		.035	.010	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20
SPI5	Pearson Correlation	.535*	.409	.474*	.474*	1	.759**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.015	.073	.035	.035		.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
SPI6	Pearson Correlation	.751**	.685**	.759**	.564**	.759**	1	.942**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.010	.000		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
Total_SPI	Pearson Correlation	.799**	.832**	.801**	.704**	.752**	.942**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI1	25.5000	4.053	.689	.878
SPI2	25.6000	4.147	.750	.868
SPI3	25.6500	4.345	.717	.874
SPI4	25.6500	4.555	.590	.891
SPI5	25.6500	4.450	.653	.883
SPI6	25.7000	3.484	.900	.840

Correlations

		Correlations						Total_SD
		SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	M
SDM1	Pearson Correlation	1	.603**	.530*	.309	.173	.175	.577**
	Sig. (2-tailed) N		.005	.016	.185	.467	.459	.008
SDM2	Pearson Correlation	20	1	.855**	.593**	.455*	.456*	.826**
	Sig. (2-tailed) N	.603**		.000	.006	.044	.043	.000
SDM3	Pearson Correlation	20	.855**	1	.550*	.419	.412	.782**
	Sig. (2-tailed) N	.530*	.000		.012	.066	.071	.000
SDM4	Pearson Correlation	20	.593**	.550*	1	.900**	.829**	.895**
	Sig. (2-tailed) N	.309	.006	.012		.000	.000	.000
SDM5	Pearson Correlation	.185	20	20	20	20	20	20
	Sig. (2-tailed) N	.173	.044	.066	.000		.000	.000
SDM6	Pearson Correlation	.467	20	20	20	20	20	20
	Sig. (2-tailed) N	.459	.456*	.412	.829**	.938**	1	.817**
Total_SDM	Pearson Correlation	.175	.043	.071	.000	.000		.000
	Sig. (2-tailed) N	.459	20	20	20	20	20	20
Total_SDM	Pearson Correlation	20	.826**	.782**	.895**	.833**	.817**	1
	Sig. (2-tailed) N	.577**	.000	.000	.000	.000	.000	
Total_SDM	Pearson Correlation	.008	20	20	20	20	20	
	Sig. (2-tailed) N	20						20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SDM1	26.3500	6.661	.415	.900
SDM2	26.1500	5.818	.741	.849
SDM3	26.2500	6.092	.688	.859
SDM4	26.3000	5.168	.825	.832
SDM5	26.2000	5.853	.754	.848
SDM6	26.2500	5.671	.718	.853

Correlations

Correlations

		ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	Total_ET
ET1	Pearson Correlation	1	.761**	.196	.440	.466*	.367	.671**
	Sig. (2-tailed)		.000	.408	.052	.038	.112	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20
ET2	Pearson Correlation	.761**	1	.372	.685**	.612**	.392	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000		.107	.001	.004	.087	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
ET3	Pearson Correlation	.196	.372	1	.572**	.700**	.477*	.748**
	Sig. (2-tailed)	.408	.107		.008	.001	.033	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
ET4	Pearson Correlation	.440	.685**	.572**	1	.524*	.467*	.784**
	Sig. (2-tailed)	.052	.001	.008		.018	.038	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
ET5	Pearson Correlation	.466*	.612**	.700**	.524*	1	.786**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.038	.004	.001	.018		.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
ET6	Pearson Correlation	.367	.392	.477*	.467*	.786**	1	.756**
	Sig. (2-tailed)	.112	.087	.033	.038	.000		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
Total_ET	Pearson Correlation	.671**	.797**	.748**	.784**	.887**	.756**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ET1	26.9000	5.147	.527	.853
ET2	26.7500	4.934	.707	.823
ET3	26.8500	4.450	.575	.856
ET4	26.8000	5.011	.692	.826
ET5	26.6500	4.661	.832	.800
ET6	26.8000	4.800	.630	.835

Correlations

Correlations

	BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	Total_BO
Pearson Correlation	1	.795**	.829**	.464*	.464*	.878**
BO1 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.040	.040	.000
N	20	20	20	20	20	20
Pearson Correlation	.795**	1	.749**	.669**	.669**	.920**
BO2 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.001	.000
N	20	20	20	20	20	20
Pearson Correlation	.829**	.749**	1	.441	.441	.869**
BO3 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.052	.052	.000
N	20	20	20	20	20	20
Pearson Correlation	.464*	.669**	.441	1	1.000**	.776**
BO4 Sig. (2-tailed)	.040	.001	.052		.000	.000
N	20	20	20	20	20	20
Pearson Correlation	.464*	.669**	.441	1.000**	1	.776**
BO5 Sig. (2-tailed)	.040	.001	.052	.000		.000
N	20	20	20	20	20	20
Pearson Correlation	.878**	.920**	.869**	.776**	.776**	1
Total_B Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
O						
N	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	20	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BO1	21.3500	4.976	.790	.850
BO2	21.3500	5.082	.868	.833
BO3	21.4000	4.463	.743	.877
BO4	20.9500	6.155	.688	.879
BO5	20.9500	6.155	.688	.879

Correlations

Correlations

		EP 1	EP 2	EP 3	EP 4	EP 5	EP 6	EP 7	EP 8	EP 9	Total_ EP
EP1	Pearson Correlation	1	.621**	.640*	.479*	.621**	.448*	.448*	.378	.378	.684**
	Sig. (2-tailed)		.004		.032	.004	.048	.048	.100	.100	.001
	N	20	20	.002	20	20	20	20	20	20	20
EP2	Pearson Correlation	.621**	1	.562*	.553*	.697**	.697**	.697*	.716*	.716*	.857**
	Sig. (2-tailed)	.004		.011	.001	.001					.000
	N	20	20	20	20	20	20	.001	.000	.000	20
EP3	Pearson Correlation	.640**	.562**	.010	.855*	.609**	.422	.422	.356	.356	.708**
	Sig. (2-tailed)	.002	.010	1	.000	.004	.064	.064	.124	.124	.000
	N	20	20	20	20	20	20	.064	.124	.124	20
EP4	Pearson Correlation	.479*	.553*	.20		.729**	.553*	.20	.20	.20	.763**
	Sig. (2-tailed)	.032	.011	.855*	1	.000	.011	.553*	.467*	.467*	.000
	N	20	20	20	20	20	20	.011	.038	.038	20
EP5	Pearson Correlation	.621**	.697**	.000	.729*	1	.798**	.798*	.673*	.673*	.888**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.20	.000		.000	.000	.673*	.673*	.000
	N	20	20	.609*	20	20	20	20	20	20	20
EP6	Pearson Correlation	.448*	.697**		.000	.798**	1	.000	.001	.001	.888**
	Sig. (2-tailed)	.048	.001	.004	.553*	.000		1.00	.844*	.844*	.000
	N	20	20	20	20	20	20	0**	.844*	.844*	20
EP7	Pearson Correlation	.448*	.697**	.422	.011	.798**	1.00	.000	.000	.000	.888**
	Sig. (2-tailed)	.048	.001	.064	.553*	.000	0**	.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	.000	.000	.000	20
EP8	Pearson Correlation	.378	.716**	.422	.011	.673**	.844**	1	.844*	.844*	.852**
	Sig. (2-tailed)	.100	.000	.064	.467*	.001	.844**	.20	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	.000	.000	20
EP9	Pearson Correlation	.378	.716**	.356	.038	.673**	.20	.844*	1	1.00	.852**
	Sig. (2-tailed)	.100	.000	.124	.467*	.001	.844**	.000		0**	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	.000	20
Total_ EP	Pearson Correlation	.684**	.857**	.356	.038	.888**	.20	.844*	1.00	.20	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.124	.763*	.000	.888**	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total_ EP	Pearson Correlation			.708*			.20				20
	Sig. (2-tailed)			.000	.000			.888*	.852*	.852*	
	N			20	20			.000	.000	.000	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
EP1	43.7500	14.724	.596	.939
EP2	43.7500	13.355	.804	.927
EP3	43.9000	14.832	.633	.936
EP4	43.8000	14.379	.695	.933
EP5	43.6000	14.253	.858	.925
EP6	43.6000	14.253	.858	.925
EP7	43.6000	14.253	.858	.925
EP8	43.6000	13.832	.805	.927
EP9	43.6000	13.832	.805	.927

HASIL ANALISIS REGRESI

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	E- Procurement (X5), Sistem Pengendalian Internal (X1), Budaya Organisasi (X4), Sumber Daya Manusia (X2), Etika (X3) ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Pencegahan fraud (Y)
 b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811 ^a	.658	.644	2.03110

- a. Predictors: (Constant), E- Procurement (X5), Sistem Pengendalian Internal (X1), Budaya Organisasi (X4), Sumber Daya Manusia (X2), Etika (X3)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	990.527	5	198.105	48.021	.000 ^b
1 Residual	515.672	125	4.125		
Total	1506.198	130			

- a. Dependent Variable: Pencegahan fraud (Y)
 b. Predictors: (Constant), E- Procurement (X5), Sistem Pengendalian Internal (X1), Budaya Organisasi (X4), Sumber Daya Manusia (X2), Etika (X3)

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.095	1.531		1.368	.174		
Sistem Pengendalian Internal (X1).	.137	.053	.190	2.569	.011	.501	1.995
Sumber Daya 1 Manusia (X2)	.114	.056	.158	2.020	.046	.447	2.236
Etika (X3)	.139	.065	.199	2.148	.034	.318	3.143
Budaya Organisasi (X4)	.178	.082	.179	2.166	.032	.403	2.480
E- Procurement (X5)	.154	.047	.251	3.294	.001	.472	2.119

a. Dependent Variable: Pencegahan fraud (Y)

UJI ASUMSI KLASIK MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.095	1.531		1.368	.174		
Sistem Pengendalian Internal (X1).	.137	.053	.190	2.569	.011	.501	1.995
Sumber Daya 1 Manusia (X2)	.114	.056	.158	2.020	.046	.447	2.236
Etika (X3)	.139	.065	.199	2.148	.034	.318	3.143
Budaya Organisasi (X4)	.178	.082	.179	2.166	.032	.403	2.480
E- Procurement (X5)	.154	.047	.251	3.294	.001	.472	2.119

a. Dependent Variable: Pencegahan fraud (Y)

UJI NORMALITAS

NPar Tests

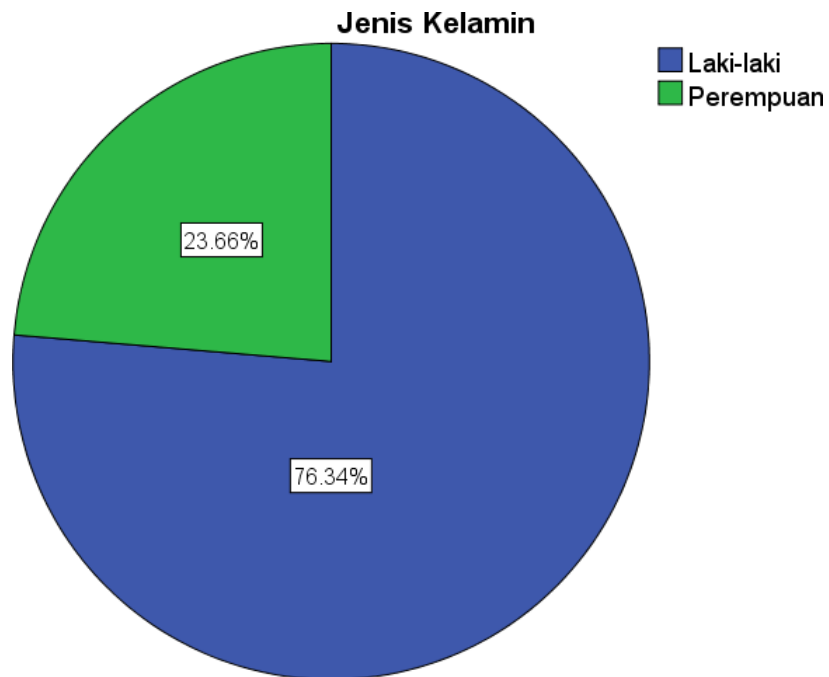
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

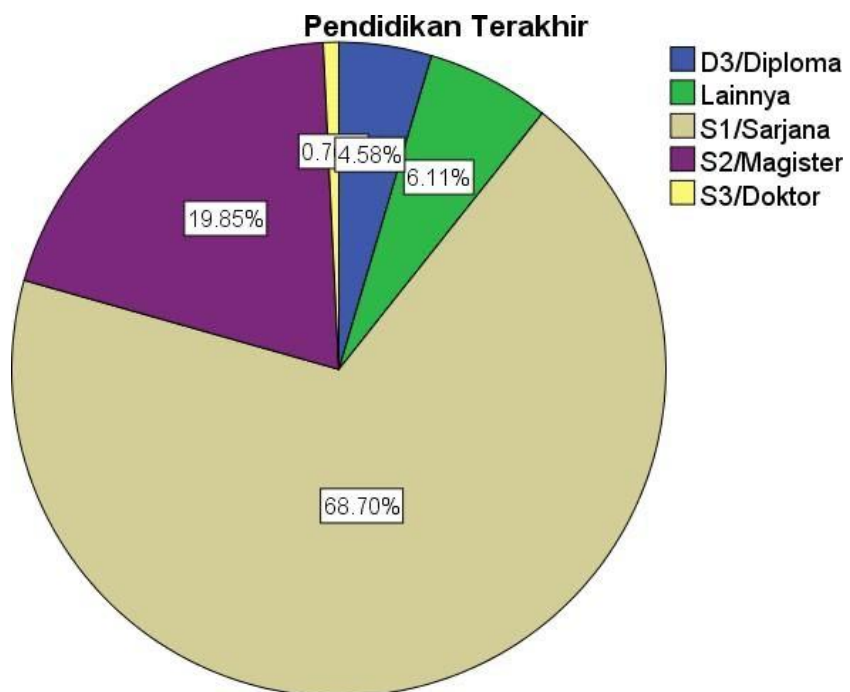
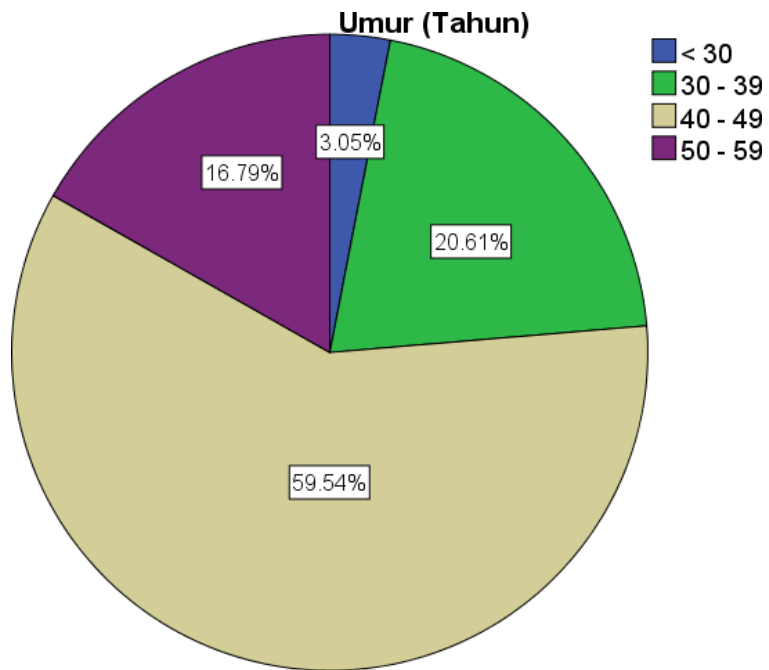
		Unstandardized Residual
N		131
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.99165864
	Absolute	.105
Most Extreme Differences	Positive	.105
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.202
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

PIE CHART





Lamanya bekerja pada jabatan sekarang (tahun)

